

**PEMBATALAN PENCALONAN HBL MANTIRI SEBAGAI DUTA BESAR INDONESIA
UNTUK AUSTRALIA
(Tinjauan dalam aspek politik)**

SKRIPSI



Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Asal : Hadiah
Pembelian
Terima : Tgl. 19 NOV 2002
No. Induk :
Oleh :
Klasifikasi :
Klasik
320.2
DEW
P
e.1

Yurida Jungga Dewi
NIM. EIA195001

Pembimbing :

Prof. Dr. Akhmad Khusyairi, MA.

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

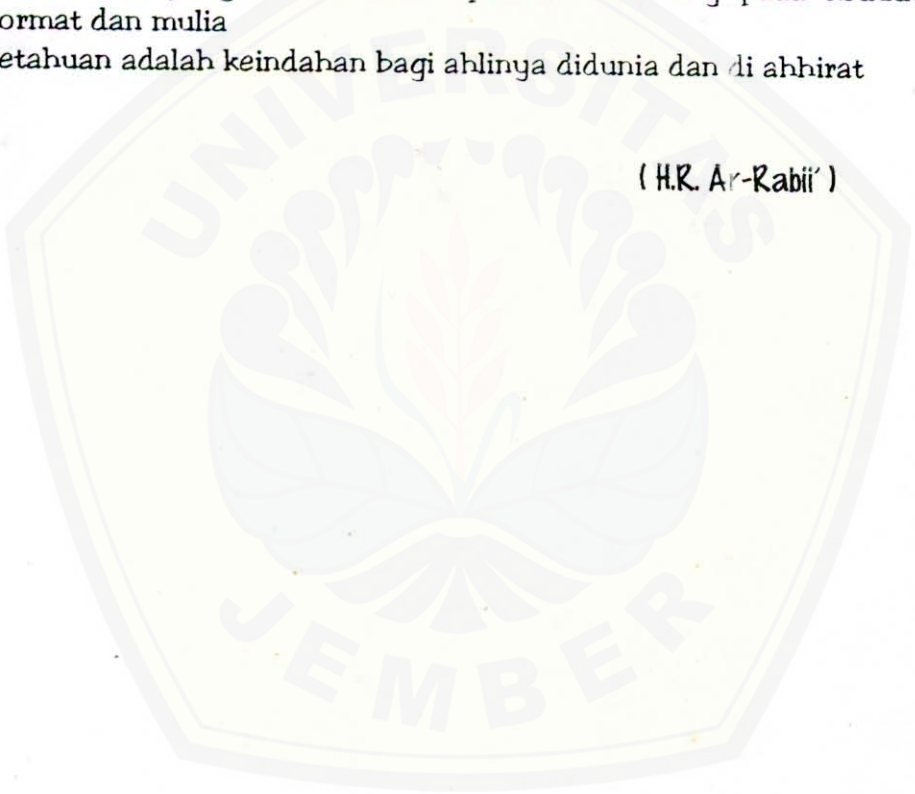
2 0 0 2

MOTTO

Tuntutlah ilmu sesungguhnya ilmu adalah pendekatan diri kepada Allah Azza wajalla, dan mengajarkannya kepada orang yang tidak tahu adalah sodaqoh
Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan seseorang pada kedudukan yang terhormat dan mulia

Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya didunia dan di ahhirat

(H.R. Ar-Rabii')



PERSEMBAHAN

Karya Tulis ini kupersembahkan untuk:

- * Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan bimbingan kepadaku
- * Seluruh Keluarga, Orang Tuaku Tercinta Bapak Supadi SH dan Ibu
- * Kakakku Devi Pusposari dan Mas Danang serta keponakanku yang lagi lucu-lucunya Sausan Nur Alya
- * Adikku yang nakal Danang Adityo Nugroho
- * Serta tak lupa untuk Sarjoko di Yogya yang selalu memberi dukungan dan dorongan kepadaku selama ini

PENGESAHAN

DIPERTAHANKAN DAN DITERIMA
DIHADAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER


PADA

HARI : SENIN
TANGGAL : 18 MARET 2002
PUKUL : 09.00

PANITIA PENGUJI

Ketua

(DR. A. Eby Hara)

Sekretaris

(Prof. DR. A. Khusyairi, MA)

Anggota Panitia Penguji

1. DR. A. Eby Hara
2. Prof. DR.A. Khusyairi. MA
3. Drs.Sunardi P. MIS
4. Dra. Sri Yuniati. Msi

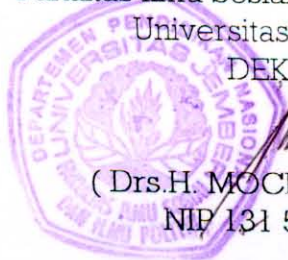

1.....

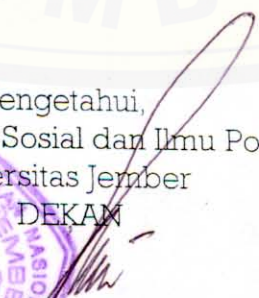
2.....

3.....

4.....

Mengetahui,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember
DEKAN




(Drs.H. MOCH TOERKI)
NIP 131 524 832

KATA PENGANTAR

Tiada yang lebih utama selain memajukan puji syukur kehadiran Allah SWT atas semua rahmat dan hidayahnya . Berkat karunia yang Dia berikan akhirnya penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S . 1) pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Dalam penyelesaiannya tidak terlepas dari bantuan , bimbingan serta motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Untuk itu ungkapan rasa terimakasih penyusun sampaikan kepada :

1. Bapak Prof.DR. H. A. Khusyairi MA selaku Dosen Pembimbing.
2. Bapak Agus Tri Hartono S.Sos , selaku Dosen Wali.
3. Bapak Drs Soekron Syah, SU selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember.
4. Bapak Drs H. Moch Toerki selaku Dekan FISIP Universitas Jember.
5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
6. Seluruh Staf dan pegawai perpustakaan UNEJ serta Perpustakaan FISIP UNEJ.
7. Untuk Sarjoko makasih banyak atas bantuan dan dukungannya selama masa penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman dan adik-adik di kos-kosan Jawa VI/74 yang selalu memberikan kesan tersendiri baik suka maupun duka khususnya buat

Ma'e Eni Megawati, Bukrili, Nyah Dewo, Cenil, Linthul, Arik Crut, Hesti, Asnah, thanks buat semuanya.

Akhirnya ucapan terimakasih penulis haturkan kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama penulis menyelesaikan studi dan tugas akhir baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak sempat penulis sebutkan.

Kalaulah ada bagian yang baik dari skripsi ini pastilah tidak lepas dari segala bantuan mereka walaupun ada bagian yang kurang baik semata-mata akibat kekurangarifan penulis.

Jember, 6 Maret 2002

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
MOTTO.....	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Alasan Pemilihan Judul.....	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan.....	5
1.2.1 Batasan Waktu.....	6
1.2.2 Batasan Materi.....	7
1.3 Permasalahan.....	7
1.4 Kerangka Dasar Teori.....	8
1.5 Hipotesis.....	12
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.6.1 Metode Pengumpulan Data.....	13
1.6.2 Metode Analisis Data.....	13
1.7 Pendekatan.....	14
BAB II DINAMIKA HUBUNGAN INDONESIA DAN AUSTRALIA.....	
2.1 Latar Belakang Hubungan Australia dan Indonesia.....	16
2.1.1 Masa Perang Kemerdekaan Indonesia.....	17
2.1.2 Masalah Irian Barat.....	20

2.2	Pasang Surut Hubungan Indonesia dan Australia	22
2.3	Timor Timur dan Permasalahannya	25

BAB III PEMBATALAN HBL MANTIRI SEBAGAI DUTA BESAR DI AUSTRALIA OLEH PEMERINTAH INDONESIA.....

3.1	Kondisi Politik Dalam Negeri Kedua Negara	31
3.1.1	Kondisi Politik Dalam Negeri Australia	31
3.1.2	Kondisi Politik Dalam Negeri Indonesia.....	36
3.2	Faktor-faktor yang menyebabkan batalnya HBL Mantiri sebagai Duta Besar di Australia	
3.2.1	Faktor Politis.....	40
3.2.2	Faktor Non Politis	46
3.3	Ditinjau dari segi tata krama diplomatik.....	49

BAB IV DAMPAK DARI PEMBATALAN HBL MANTIRI TERHADAP HUBUNGAN INDONESIA – AUSTRALIA.....

4.1	Ditinjau dari segi politis.....	49
4.2	Prospek Hubungan Indonesia dan Australia pasca pembatalan HBL Mantiri.....	60
4.2.1	Dalam Jangka Pendek	60
4.2.2	Dalam Jangka Panjang	61

BAB V KESIMPULAN..... 65

DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN



1.1 Alasan pemilihan judul

Dalam dunia internasional suatu negara sudah pasti akan melakukan hubungan dengan negara lain baik yang bersifat bilateral maupun multilateral. Karena pada dasarnya suatu negara akan selalu memiliki kepentingan dengan negara lain. Salah satu cara yang dipergunakan dalam hubungan internasional yaitu dengan memakai metode diplomasi.

Adanya suatu hubungan diplomatik dengan suatu negara maka suatu negara harus menentukan sampai kearah mana politik luar negeri dari suatu negara akan dibawa, dimana hal ini berkaitan dengan kebijaksanaan luar negeri yang akan diambil oleh suatu negara dalam hubungan internasional.

Di dalam hubungan diplomatik, khususnya yang berkaitan dengan hubungan bilateral antara dua negara segala kebijakan luar negeri yang menyangkut hubungan antara keduanya tentunya dibuat oleh negara. Walaupun pada hakekatnya segala keputusan atau kebijakan luar negeri diputuskan oleh perseorangan dan kelompok yang bertindak atas nama negaranya. Apa yang telah dikatakan oleh orang-orang tersebut, dapat dianggap sebagai suatu interaksi antara pembuat keputusan (decision maker) dan lingkungannya.¹

Selama kurun waktu 1945-1949, Australia merupakan "sahabat karib" Indonesia. Kedua negara saling menjalin suatu hubungan yang baik. Meskipun rakyat dan pemerintah Australia dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Chifley dari Partai Buruh mengakui bahwa negara Kesatuan RI baru berumur setahun jagung. Namun hubungan baik ini

¹ Joseph Frankel, *Hubungan Internasional*, Terjemahan oleh Drs.Laila H. Hasyim, Bumi Aksara, Jakarta, anggota IKAPI, 1991, hlm. 32

kemudian memburuk menyusul dengan kemenangan Partai Liberal pimpinan Menzies dalam pemilu 1949.

Pada waktu itu Perdana Menteri Menzies sangat mengkhawatirkan Indonesia yang dipersepsikan sebagai "ancaman potensial dari utara" (Hordes from Asia and Yellow Peril).² Kekhawatiran ini semakin diperkuat oleh isu Irian Barat (sekarang Irian Jaya) yang disengketakan Indonesia-Belanda, serta politik pengganggangan Malaya yang dilancarkan oleh Sukarno pada permulaan tahun 1960-an.

Berkenaan dengan masalah Irian Barat, Australia mendukung Belanda. Sikap yang demikian dapat dipahami karena Belanda pada saat itu termasuk dalam sekutu Australia, ditambah dengan bahwa Australia memandang teritorial Australia sebagai kawasan strategis yang termasuk dalam konsep pertahanan-keamanan yang dinamakan *defence in depth*, yaitu sebuah konsep pertahanan yang menentang penguasaan wilayah-wilayah seputar Australia oleh negara-negara yang dinilai tidak bersahabat dengan Australia.³

Hubungan baik yang sempat terganggu tadi menampakkan kehangatannya kembali setelah tampilnya pemerintah orde baru yang ditandai dengan hancurnya Partai Komunis Indonesia di pentas politik nasional pada tahun 1965. Dengan prinsip *there is no foreseeable major threat to Australia for fifteen years*, tiga perdana menteri pengganti Menzies (William McMahon, Edward George Whitlam dan John Malcolm Fraser) menjalin kembali hubungan baik dengan Australia.

Namun hubungan baik tersebut memburuk kembali menjelang Timor Timur berintegrasi ke dalam kedaulatan RI tanggal 17 Juli 1976, walaupun tidak berlangsung lama. Perdana Menteri Fraser dalam

² Surya, *Fluktuasi hubungan Indonesia-Australia*, 24 Januari 1996, hlm.6 klm 3-9

³ Dikutip dari : *Ibid*, hlm.6 klm 3-9

kunjungan kenegaraannya ke Indonesia pada bulan September 1976 telah menyatakan pengakuan de facto atas integrasi Timor Timur.

Walaupun secara de jure belum menyatakan pengakuannya. Hal ini terbukti dimana dalam setiap persidangan di Dewan Keamanan PBB mengenai Timor Timur Australia selalu abstain, bahkan hal ini berlangsung sampai tahun 1985.

Namun dengan adanya pengakuan secara de facto oleh Australia tadi telah mendorong Jakarta-Canberra untuk pertama kalinya mau menegosiasikan mengenai Timor Gap yang potensi minyaknya besar pada bulan desember 1978.

Hubungan baik tersebut dilanjutkan oleh Bob Hawke, pengganti Fraser. Namun hubungan baik tersebut lagi-lagi mengalami gangguan kali ini mengenai David Jenkins, wartawan harian *Sidney Morning* lewat tulisannya pada tanggal 10 April 1986 yang mencemarkan nama baik keluarga Presiden Suharto. Memburuknya hubungan jakarta-canberra ini segera teratasi menyusul dengan keputusan pemerintah kedua negara untuk saling melakukan kunjungan resmi di tingkat pejabat tinggi (menteri) pada tahun 1988-1990. Tetapi membaiknya hubungan Indonesia-Australia tersebut cepat berakhir dengan terjadinya insiden berdarah di Dili 12 November 1991.

Hubungan kedua negara baru membaik lagi setelah perdana menteri Keating melakukan kunjungan ke Jakarta akhir April 1992. Pada kesempatan ini Keating mengeluarkan statemen bahwa hubungan negaranya dengan Indonesia mudah terganggu oleh isu kecil disebabkan karena kedua negara belum mempunyai landasan kerjasama ekonomi yang kuat.

Hubungan baik yang dirintis oleh Keating tersebut berlangsung semakin baik saat Indonesia menjabat sebagai Ketua APEC 1993-1994. Hal ini terbukti sepanjang tahun 1994 PM Keating mengadakan kunjungan ke Jakarta sebanyak dua kali (akhir Juli dan Oktober 1994), merupakan suatu

frekuensi kunjungan tinggi yang belum pernah dilakukan oleh para pendahulu Keating.

Kunjungan Keating ke Jakarta yang intensif tersebut menjawab upaya-upaya para agitator kontra-integrasi Timor Timur yang pada akhir Mei sampai awal Juni 1994 menyelenggarakan APCET (Asia Pacific Conference of East Timor) di Manila, Filipina yang memang tidak menghendaki Australia berhubungan baik dengan Indonesia.

Sayangnya ketangguhan Keating dalam menjawab dan menangkal upaya-upaya para agitator tersebut tidak dapat terus bertahan, sehingga ketika sekelompok antiintegrasi Timor Timur melakukan aksi pembakaran terhadap bendera merah putih, sehingga pemerintahan Keating tidak mampu berbuat apa-apa untuk mencegahnya.

Adanya peristiwa tersebut membawa konsekuensi terhadap hubungan Indonesia dan Australia yang kembali ke titik rendah. Dimana hal tersebut diperburuk lagi oleh keputusan pemerintahan Keating untuk menolak HBL Mantiri yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia sebagai Duta besar di Australia menggantikan Sabam Siagian. Karena pemerintah Australia menganggap bahwa HBL Mantiri memiliki cacat moral.

Dengan adanya pencalonan Letjen HBL. Mantiri telah menimbulkan reaksi dari berbagai pihak yang ditandai dengan munculnya pendapat-pendapat baik yang pro maupun yang kontra dari sikap yang diambil oleh pemerintah Indonesia.

Batalnya pencalonan Mantiri sebagai Duta Besar di Australia disebabkan adanya protes dari anggota parlemen Australia yang mewakili masyarakat tentang pernyataan Mantiri pada tahun 1992 yang lalu, yaitu ketika masih menjabat sebagai Panglima Kodam Udayana yang menyatakan bahwa tindakan pemerintah dalam mengatasi pengunjuk rasa

di Dili tahun 1991 sehingga menewaskan sekitar 50 orang atau lebih warga Timor Timur merupakan suatu tindakan yang wajar.⁴

Akhirnya dengan terjadinya peristiwa tersebut maka pemerintah mengambil suatu kebijakan dengan membatalkan pencalonan Mantiri dan untuk sementara waktu mengosongkan pos duta besar RI di Canberra.

Secara umum pemilihan judul mengenai " Pembatalan pencalonan HBL Mantiri sebagai duta Besar Indonesia untuk Australia dalam aspek politik " ialah untuk memahami dan mempelajari bagaimanakah hubungan kedua negara secara diplomatik dengan mengambil kasus mantiri sebagai tolok ukurnya.

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam membahas permasalahan harus ditentukan ruang lingkup pembahasan agar pembahasan masalah berkembang ke arah sasaran yang tepat. Dimana tujuan diadakan pembatasan masalah agar di dalam pembahasan nanti tidak keluar dari jalur kerangka masalah yang sudah ditentukan.

Joseph Frankel menyatakan bahwa :

"Pada titik-titik tertentu kejadian historis adalah unik. Karena itu semakin luas ruang lingkup studi kita, semakin sukar untuk membuat pernyataan-pernyataan."⁵

Sedangkan Prof. Drs. Sutrisno Hadi, MA berpendapat bahwa :

"Semua peristiwa berkaitan dengan rangkaian hukum kausalitas, tetapi tidak semua sebab dapat menimbulkan akibat, karena sebab ini masih harus dibatasi oleh ruang dan waktu."⁶

⁴ Gatra, *Calon Dubes Diprotes*, Edisi 15 Juli 1995

⁵ Dikutip dari: *Ibid*, hal 20

⁶ Prof. Drs. Sutrisno Hadi, MA, " *Metode Research Jilid 1* ", Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1988, hal.19

Untuk mempermudah dalam pembahasan, maka di dalam tulisan ini penulis memberikan batasan dalam dua batasan yaitu, batasan waktu dan materi. Limitasi waktu, penulis tentukan pada saat kasus tersebut mulai berkembang hingga menjadi suatu permasalahan yang bersifat nasional. Yaitu dimana masyarakat Australia yang diwakili oleh parlemen Australia menolak untuk menerima Letjen HBL Mantiri sebagai wakil pemerintah Indonesia. Kasus tersebut terjadi bulan Juli 1995.

Penulis sengaja menentukan limitasi waktu seperti yang telah disebutkan karena mengingat hubungan antara Indonesia dan Australia selama beberapa tahun terakhir ini mengalami pasang surut. Hal ini dapat dilihat pada masa antara tahun 1972-1988, hubungan kedua negara diwarnai oleh beberapa masalah yang mengakibatkan berfluktuasinya hubungan kedua negara tersebut. Masalah pertama yang paling mengganggu adalah masalah Timor-Timur. Soal Timor-Timur ini mulai mewarnai kebijakan Luar Negeri Australia selama masa jabatan kedua Perdana Menteri dari Partai Buruh, Whitlam (1974-1975), selama masa PM koalisi Liberal-Nasional Fraser (1975-1983) dan ketika PM Buruh Hawke yang berkuasa sejak 1983.

Sekalipun terjadi perdebatan di Parlemen pemerintah Australia (baik Partai Buruh maupun koalisi Liberal-Nasional) mempunyai pandangan yang sama mengenai masalah penggabungan Timor-Timur ke dalam wilayah Indonesia. Bagi Pemerintah buruh maupun koalisi Liberal-Nasional, prioritas tertinggi adalah memelihara hubungan persahabatan dengan Indonesia dan tidak menghendaki adanya isu-isu yang dapat mengganggu hubungan tersebut.⁷ Selanjutnya limitasi materi yang penulis jadikan sebagai fokus bahasan, sehubungan hal-hal yang menyebabkan penolakan Mantiri oleh masyarakat Australia serta bagaimana kasus

⁷ Zulkifli Hamid, *Sistem Politik Australia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya dengan LIP-FISIP-UI, 1999, hlm 419

tersebut apabila ditinjau dari segi politis. Dimana dalam hal ini ada beberapa aspek yang mempengaruhi terjadinya pembatalan tersebut oleh pemerintah Indonesia baik yang bersifat politis maupun non politis. Seperti halnya kasus Timor Timor telah menjadi sesuatu yang mengganjal antara hubungan Indonesia dan Australia.

1.3 Problematika

Sebelum penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini maka tidak ada salahnya bila penulis mengutip beberapa pendapat dari para pakar yang memiliki kompetensi atau kapasitas dalam penulisan ini.

The Liang Gie berpendapat bahwa :

“ Masalah adalah kejadian atau keadaan yang menimbulkan pertanyaan dalam hati kita tentang kedudukannya. Kita tidak puas hanya dengan melihat saja melainkan kita ingin mengetahui lebih mendalam. Masalah berhubungan dengan Ilmu. Ilmu senantiasa mengajukan pertanyaan tentang bagaimana dan apa sebabnya.”⁸

Berdasarkan pengertian diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa penentuan batasan masalah secara jelas, maka dapat membawa penulis kearah pembahasan yang lebih terarah.

Dengan adanya kasus pembatalan terhadap pencalonan Mantiri sebagai Duta Besar Indonesia untuk Australia maka ada beberapa permasalahan yang menarik untuk dibahas.

⁸ The Liang Gie, *Ilmu Politik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1973, hal 48

Permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini ialah :

Faktor-faktor apakah yang menyebabkan pemerintah Indonesia membatalkan pencalonan HBL Mantiri sebagai Duta Besar Indonesia untuk Australia.

1.4 Kerangka Dasar Teori

Yang dimaksud dengan kerangka dasar teori adalah landasan berpijak dalam pemikiran mengenai suatu pendapat dengan menggunakan teori dalam memecahkan masalah dan menganalisa permasalahan.

Landasan teori yang ada digunakan untuk menjembatani antara problematika dan hipotesa.

Menurut McCain dan Seagal mendefinisikan teori sebagai berikut:

"Serangkaian statement yang saling berkaitan ... (yang terdiri dari):

1. Kalimat-kalimat yang memperkenalkan istilah-istilah yang merujuk kepada konsep dasar teori itu;
2. Kalimat-kalimat yang menghubungkan konsep dasar itu satu sama lain dan
3. Kalimat-kalimat yang menghubungkan beberapa statemen teoritis itu dengan sekumpulan kemungkinan obyek pengamatan empiris (hipotesa)".⁹

Dalam membahas masalah ini teori yang digunakan oleh penulis adalah:

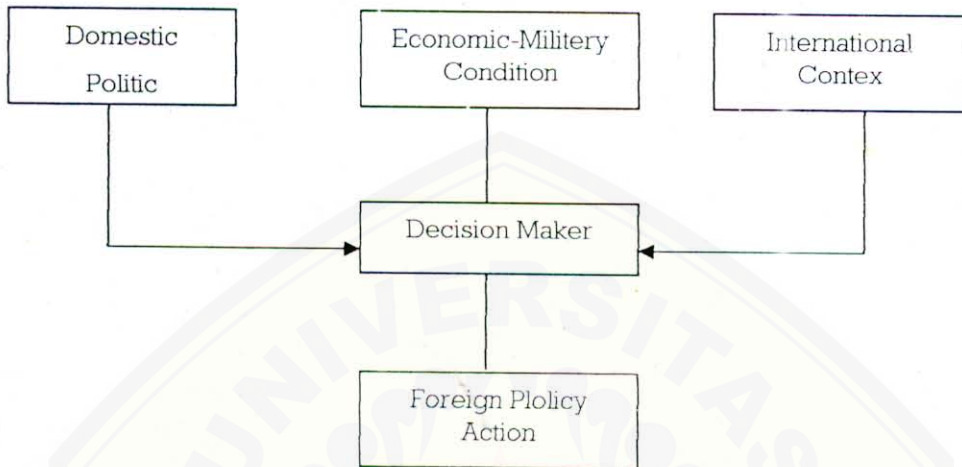
Teori Pembuatan Keputusan Luar Negeri William D. Coplin.

Menurut Coplin :

" Salah besar kalau kita menganggap bahwa para pengambil keputusan politik luar negeri bertindak sembarangan, akan tetapi sebaliknya tindakan politik luar negeri tertentu mungkin bila dipandang sebagai akibat dari konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil keputusan politik luar negeri.

⁹ McCain dan Seagal, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, Mochtar Mas'oeed, Jakarta, 1990, hal 219

Pertama, kondisi politik dalam negeri, kedua kemampuan ekonomi dan militer, dan ketiga konteks internasional yaitu kondisi khusus negara dalam hubungannya dengan negara lain dalam sistem itu".¹⁰



a. Kondisi Politik Dalam Negeri.

Sebenarnya situasi politik dalam negeri kedua negara baik Indonesia dan Australia berada dalam kondisi yang stabil. Dimana pada saat itu Indonesia yang berada dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto, sedangkan Australia dibawah Perdana Menteri Paul Keating. Hanya saja pada masing-masing negara terdapat beberapa masalah yang harus segera diselesaikan. Seperti halnya Indonesia dengan masalah Timor Timor yang selalu saja mengundang banyak permasalahan tersendiri bagi pemerintah Indonesia, dan merupakan tugas berat yang harus segera dituntaskan. Sedangkan Australia sendiri pada saat itu sedang mempersiapkan diri menjelang pemilu awal tahun 1996. Dimana pada pemilu mendatang ini akan terjadi suatu persaingan yang sangat ketat antara Partai Buruh dan Partai Liberal.

¹⁰ William D. Coplin, *Introduction to International Politics A Theoretical Overview*, Terjemahan oleh Mercedes Marbun, CV. Sinar Baru Offset, Bandung 1992, hal 30

b. Kondisi Ekonomi dan Militer.

Indonesia bukan saja penting dari segi geo-politik tetapi juga dari segi ekonomi. Dengan kondisi perekonomian yang sedang berkembang ditambah dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi maka Indonesia membutuhkan adanya penanaman modal asing untuk meningkatkan perekonomiannya. Seperti halnya Australia yang telah menjalin perdagangan dengan Indonesia semakin meningkatkan intensitas perdagangannya yang pada tahun 1988 sejumlah \$ 1 triliun telah meningkat menjadi \$ 3 triliun pada tahun 1993. Selain itu Australia adalah salah satu dari 10 investor terbesar di Indonesia. Dimana terdapat 180 perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur serta jasa yang ada di Indonesia, sehingga total investasi mencapai lebih dari \$ 2,5 triliun. Selain itu menurut data statistik, Indonesia telah menginvestasikan sekitar \$ 200 milyar di Australia, meskipun gambaran yang sebenarnya mungkin saja lebih tinggi daripada perkiraan tersebut¹¹

Dari segi militer, setelah era perang dingin antara US dan Amerika Serikat berakhir Indonesia bukanlah merupakan ancaman bagi Australia. Sebab dengan sejumlah tentara yang memiliki loyalitas yang tinggi namun hanya ditujukan untuk melindungi wilayah kesatuan Indonesia. Sedangkan factor kedua ini kurang mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan dari pemerintah Indonesia mengenai pencalonan Mantiri karena factor tersebut kurang relevan dengan permasalahan yang ada.

¹¹ Hadi Soesastro dan Tim Mcdonald, *Indonesia-Australia Relation, Diverse Culture, Converging Interest*, CSIS, Jakarta, 1995, hal 5-9

c. Konteks Internasional.

Merupakan produk dari tindakan kebijakan luar negeri oleh negara-negara lain baik di waktu lalu. Sekarang, maupun yang akan datang. Dalam hal ini Bruce Russett dan Harvey Starr menjelaskan:

"Tahap pertama dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri adalah timbulnya suatu situasi, timbulnya suatu masalah. Tetapi sebelum situasi itu muncul untuk ditanggapi oleh para pembuat keputusan, ada tiga hal yang terjadi. Pertama, ada semacam stimulus atau rangsangan dari lingkungan yang disebut "trigger event". Kedua, ada upaya mempersepsi stimulus itu. Ketiga, ada upaya untuk menafsirkan stimulus yang telah dipersepsi itu. Persepsi dan penafsiran itu sangat bergantung pada citra yang sudah ada dalam benak pembuat keputusan".¹²

Diantara ketiga faktor tersebut di atas faktor international context merupakan faktor yang paling berpengaruh bagi pemerintah Indonesia dalam pembuatan kebijakan dalam hal pencalonan HBL Mantiri sebagai duta besar di Australia yaitu dengan mempertimbangkan kondisi politik domestik Australia saat itu.

Karena itu dalam hal ini untuk mengantisipasi serta menanggapi reaksi Australia terhadap pencalonan HBL Mantiri sebagai Duta Besar di Australia, maka pemerintah Indonesia berusaha untuk bersikap positif. Dengan berdasarkan atas pengalaman masa lalu, maka pemerintah Indonesia menyadari benar bahwa sikap konfrontatis tanpa kompromi tidak akan membawa keuntungan karena kondisi saat ini menuntut adanya suatu kerjasama.

¹² Bruce Russett and Harvey Starr, *World Politics The Menu For Choice*, WH Freeman, New York hal 303 dalam Mochtar Mas'ood, *Studi HI Tingkat Analisa dan Teorisis*, PAU UGM hal 20

1.5 Hipotesis

Marzuki dalam bukunya *Metodologi Riset* mengatakan bahwa :

"Hipotesa adalah dugaan yang mungkin benar atau mungkin juga salah. Dia akan ditolak jika palsu dan akan diterima jika fakta-fakta membenarkan. Hipotesa dapat juga dipandang sebagai konklusi yang sifatnya sangat sederhana."¹³

Dengan demikian hipotesis bisa berarti penjelasan sementara yang nantinya dibuktikan kebenarannya lewat penelitian atau riset.

Sehingga dengan berdasarkan uraian tersebut maka penulis dapat merumuskan hipotesa sebagai berikut:

"Faktor yang menyebabkan pemerintah Indonesia membatalkan pencalonan HBL Mantiri karena pemerintah Indonesia mendapat tekanan dari masyarakat Australia yang menganggap bahwa Mantiri terlibat dalam peristiwa Dilli serta mempertimbangkan politik domestik di Australia. Selain itu juga dikarenakan adanya perbedaan system nilai dan budaya diantara kedua negara yang terkadang menimbulkan kesalahpahaman antara kedua Negara tersebut. Sehingga apabila pencalonan tersebut diteruskan maka akan menyebabkan hubungan kedua negara menjadi bertambah rumit."

1.6 Metode Penelitian

Setiap karya tulis ilmiah memerlukan adanya penelitian dengan menggunakan metode-metode tertentu yang sesuai dengan obyek penelitian. Demikian pula untuk membahas permasalahannya diperlukan adanya pendekatan tertentu.

Menurut The Liang Ghie, metode adalah ;

" Cara atau langkah yang berulang-ulang kembali. Sehingga menjadi pola untuk menggali pengetahuan tentang suatu gejala. Pada ujung awalnya ini merupakan langkah untuk mengumpulkan data-data, sedangkan pada ujung akhirnya

¹³ Marzuki, *Metodologi Riset*, BPFE UII, Yogyakarta, 1982, hal 33

merupakan langkah untuk memeriksa kebenaran daripada pernyataan. Pernyataan yang dibuat mengenai gejala tersebut."¹⁴

Dari pengertian tersebut diatas maka metode merupakan jembatan atau penghubung yang mempermudah baik awalnya maupun dalam mencari kesimpulan yang benar dan akurat tentang penulisan, baik mengenai bagaimana tulisan ilmiah serta buku-buku yang dijadikan pertimbangan untuk persiapan melakukan penelitian. Selanjutnya diperlukan tahapan-tahapan sebagai langkah nyata. Adapun penelitian yang penulis lakukan terdiri dari tahap pengumpulan data dan analisis data.

1.6.1 Tahap Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data-data yang diperlukan, penulis melakukan penelitian tidak langsung, artinya data-data hasil pengamatan terhadap obyek dikumpulkan melalui lembaga-lembaga tertentu. Oleh sebab itu data yang dikumpulkan adalah data yang tidak langsung (data sekunder).

Adapun penelitian perpustakaan ini penulis lakukan pada :

1. Perpustakaan pusat Universitas Jember
2. Perpustakaan FISIP Universitas Jember
3. Pusat lembaga dan Informasi Kompas

1.6.2. Metode Analisis Data

Untuk memperoleh hasil analisa data baik maka penulis menggunakan gabungan cara berfikir deduktif.

Cara berfikir deduktif menurut Sutrisno Hadi adalah :

" Prinsip berfikir Deduktif adalah apa yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam suatu kelas atau jenis berlaku juga sebagai hal yang benar pada semua peristiwa yang termasuk dalam kelas atau jenis itu. Jika orang dapat

¹⁴ Dikutip dari : *Ibid*, hal 178

membuktikan bahwa sesuatu peristiwa termasuk dalam kelas yang dipandang benar, maka secara logika dan otomatis orang dapat menarik kesimpulan bahwa kebenaran yang terdapat dalam kelas itu juga menjadi kebenaran bagi peristiwa yang khusus itu.¹⁵

Penulis menggunakan cara berfikir deduktif karena data-data yang diperoleh adalah data-data sekunder yang diambil dari buku-buku, artikel serta literatur yang ada.

1.7 Pendekatan

Untuk menganalisa fenomena dalam tulisan ini diperlukan adanya pendekatan untuk mengarahkan penelitian dan penelaahan yang lebih jelas.

Pendekatan menurut The Liang Ghie :

“ Hampiran-hampiran yang merupakan keseluruhan unsur yang dipakai untuk mendekati suatu sasaran memasuki suatu bidang ilmu dan memahami pengetahuan sesaran teratur dan bulat mengenai sasaran yang ditelaah oleh ilmu pengetahuan.”¹⁶

Dalam tulisan ini penulis menggunakan pendekatan sejarah (historical approach).

Pendekatan sejarah menurut The Liang Ghie :

“Pengkajian tentang kejadian-kejadian masa lampau menurut urutan waktu. Menggunakan pendekatan sejarah oleh peneliti terutama berkaitan dengan kisah peristiwa yang muncul secara berurutan atau sebagai upaya untuk menciptakan kembali suatu pengalihan sejarah dalam menguji jawaban mengapa kesinambungan tempo dulu dan sekarang dapat dipastikan dan dapat dipertahankan.”¹⁷

Penggunaan pendekatan sejarah ini disebabkan oleh peristiwa-

¹⁵Dikutip dari : *Ibid*, hal 36

¹⁶ Dikutip dari : *Ibid*, hal 75

¹⁷Dikutip dari : *Ibid* , hal 76

peristiwa yang terjadi dimasa lampau tidak dapat diabaikan untuk memahami peristiwa-peristiwa yang berlangsung, bahkan peristiwa masa lalu merupakan bahan untuk memprediksi kejadian-kejadian yang serupa yang terjadi pada masa depan.

Dalam kaitannya dengan kasus Letjen HBL Mantiri maka penulis melalui pendekatan sejarah tersebut akan mengulas bagaimana pasang surutnya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia sehingga melatarbelakangi terjadinya kasus tersebut.



BAB II

DINAMIKA HUBUNGAN INDONESIA dan AUSTRALIA



2.1 Latar belakang hubungan Australia dan Indonesia

Pada hakekatnya hubungan antara Australia dan Indonesia dilatarbelakangi oleh aspek-aspek yang bersifat historis. Hal ini dapat dilihat dimana hubungan antara Australia dan Indonesia dimulai sejak perang kemerdekaan di Indonesia, Australia memiliki peranan yang cukup besar. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa pemerintah Australia pada masa tahun 1945 sampai 1949 bersikap simpatik terhadap negara dan rakyat Indonesia pada masa perang kemerdekaan.

Hubungan antara Australia dan Indonesia dapat dikatakan sebagai dua tetangga yang masih asing pada masa sebelum PD II. Hal tersebut merupakan ungkapan yang masih dapat digunakan saat ini, yang menunjukkan adanya peluang yang hilang. Kiranya hal ini merupakan tanggapan yang menyedihkan, juga tentang kegagalan untuk menghasilkan harapan yang besar dari kerjasama dan pengertian yang mendalam yang pada suatu waktu tampak begitu nyata akan dapat diperoleh.

Apabila dilihat dari sisi geografis bagi Australia, Indonesia adalah salah satu tetangga yang penting dalam kebijakan pertahanan dan luar negeri Australia. Sebab Indonesia terletak diantara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, yang mana melalui posisi tersebut secara tidak langsung dapat membantu pada sistem pertahanan dan keamanan Australia.

Adanya takdir geografis demikian tidak pernah dapat ditolak, kecuali kedua bangsa tersebut harus mampu menciptakan suatu kemitraan yang sehat yang dapat menjamin kestabilan kawasan mereka. Adanya hubungan kemitraan yang sehat memang telah dibangun oleh kedua negara. Namun di dalam perkembangannya hubungan antara Indonesia dan Australia tidak selalu berjalan lancar.

2.1.1 Masa Perang Kemerdekaan Indonesia

Hubungan antara kedua negara tidak berjalan dengan baik karena ada beberapa hal yang menyebabkan hubungan tersebut tersendat-sendat. Perbedaan-perbedaan budaya dan latar belakang sejarah terbentuknya negara serta prioritas-prioritas kebijakan politik dalam dan luar negeri antara kedua negara sangat mempengaruhi ketidaksehatan dalam hubungan kedua negara tersebut.

Hubungan antara Indonesia dan Australia diawali sejak perang kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Dukungan pemerintah Australia terhadap kemerdekaan Indonesia yang telah dijajah selama 350 tahun oleh Belanda paling dirasakan antara tahun 1945 sampai tahun 1950.

Pada awalnya, Australia tidak ingin terlibat terlalu jauh dalam persoalan kolonial di Indonesia, dan berusaha memberikan simpati kepada usaha-usaha yang menyangkut penyelesaian persoalan kemerdekaan Indonesia.

Adanya peranan Australia di dalam masa perang kemerdekaan Indonesia disebabkan karena beberapa alasan yang bersifat intern. Dari masa federasi, Australia selalu memandang Pasifik Selatan sebagai pintu masuk dalam lingkungan pengaruhnya, bahkan salah satu kebijakan dari Australia adalah tentang ekspansi.¹

Menjalin hubungan dengan Indonesia walaupun masih mungkin dan diperlukan sekali, mau tidak mau harus dibatasi oleh adanya kepentingan untuk menjamin kepastian bahwa tetangga yang berpenduduk besar tersebut tidak akan berada dalam posisi yang bisa menimbulkan tantangan terhadap keunggulan Australia di kawasan Pasifik Selatan.

Bagi Australia kepentingan yang paling utama adalah masalah keamanan, tanpa kecuali hal ini menjadi syarat kehadiran terus menerus

¹ Susan Critchley, *Hubungan Australia dengan Indonesia Faktor Geografi, Politik dan Strategi keamanan* Jakarta :UI-Press, 1995 Op.Cit. hal 25

kekuatan kolonial Eropa di dalam suatu wilayah sedangkan dalam hal ini Australia tetap merasa bahwa dirinya menjadi pos terdepan yang terkucil dari peradaban Inggris.

Rasa simpati Australia terhadap Indonesia pernah diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Australia, Dr, Herbert Vere Evatt, pada bulan April 1943 di dalam kunjungannya ke AS yang menyarankan agar Hindia Belanda dan Australia dapat menjadi mitra yang erat di dalam mengembangkan dan mendatangkan cara hidup yang lebih baik bagi rakyat Indonesia.²

Pada masa itu segera setelah kaum nasionalis dibawah pimpinan Sukarno dan M. Hatta menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, kaum buruh galangan kapal Australia berusaha untuk mewujudkan dukungan dan simpati mereka yaitu dengan melarang semua kapal Belanda memasuki perairan Australia.

Hal ini disebabkan Belanda menggunakan Australia sebagai pelabuhan untuk menguasai kembali Indonesia yang pada masa itu masih belum terbentuk melalui tindakan militer. Peristiwa inilah yang menyatukan hubungan antara kedua negara serta menempatkan Australia sebagai kawan dalam pandangan bangsa Indonesia.

Dalam dunia internasional peranan Australia dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia adalah cukup besar. Hal ini merupakan perwujudan dari perhatian politik luar negeri Australia dari kepemimpinan PM Chitley serta antusiasme yang ditunjukkan oleh menteri luar negerinya, Dr.H.V. Evatt. Demikian pula peranan yang dimainkan oleh simpatisan kaum nasionalis Indonesia yang menjabat sebagai wakil tetap Australia di PBB.

²Zulkifli Hamid, *Sistem Politik Australia*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya dengan LIP-FISIP-UI, 1999, hal 419

Australia terus mengikuti perkembangan yang sedang terjadi di Indonesia setelah terjadinya penandatanganan Perjanjian Linggarjati antara Indonesia dan Belanda yang diawasi oleh Inggris. Perjanjian Linggarjati yang disetujui tanggal 15 November 1946, terus berlanjut dengan pengakuan Belanda secara de facto atas kemerdekaan Indonesia terhadap wilayahnya yaitu Jawa, Sumatra dan Madura.

Oleh karena itu Australia yang pada saat itu menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, kemudian mengecam aksi militer Belanda pada 20 Juli 1947. Selain itu, serikat buruh pelabuhan Australia kembali mengadakan pemboikotan dan larangan terhadap kapal-kapal Belanda yang membawa persenjataan untuk dikirim kepada militer Belanda yang ada di Indonesia.

Sejak saat itu, Australia mulai memasuki secara langsung ke dalam persoalan kemerdekaan Indonesia. Wakil Australia di PBB mengusulkan dan mengajukan negaranya untuk bertindak sebagai arbitrase di dalam persoalan Indonesia dan Belanda.

Peran Australia sangatlah kritis dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hal ini tercermin dengan diselenggarakannya perjanjian Renville 17 Januari 1948 antara Indonesia dan Belanda. Melalui keanggotaannya di UNCI (United Nations Committee on Indonesia), Australia mendesak dua negara lainnya terutama AS agar menggunakan pengaruhnya untuk mendesak Belanda agar segera merundingkan penyelesaian terakhir sesuai dengan persetujuan tersebut.

Akhirnya kedaulatan Indonesia diserahkan oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar tgl 27 Desember 1949. Dapat dikatakan bahwa sebagian dari pengakuan dunia internasional terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia atas wilayahnya disebabkan oleh adanya peranan besar dari Australia.

Seiring dengan terjadinya pergantian pemerintahan di Australia dari Partai Buruh kepada koalisi Partai Liberal-Country dibawah pimpinan PM

Menzies telah membawa perubahan pula dalam pola hubungan Indonesia dan Australia. Pemerintahan koalisi Liberal-Country dibawah PM Menzies menjalankan kebijakan luar negeri yang berbeda bila dibandingkan dengan masa kepemimpinan PM Chitley.

2.1.2 Masalah Irian Barat

Pada masa kepemimpinan Menzies segala kebijakan luar negeri Australia dipengaruhi oleh adanya situasi perang dingin antara AS dan Uni Soviet. Dengan adanya perang dingin tersebut telah membawa Australia kepada sikap yang pro pada kekuatan Barat. Hubungan antara Indonesia dan Australia sejak Partai Koalisi Liberal-Nasional memerintah pada tahun 1949 didominasi oleh perselisihan antara Indonesia dan Belanda mengenai masalah Irian Barat.

Pada waktu itu Australia yang berada dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Menzies mendukung atas kebijaksanaan Belanda dalam mempertahankan Irian Barat. Adanya kebijaksanaan Australia tersebut menyebabkan hubungannya dengan Indonesia menjadi renggang.³

Dengan adanya permasalahan Irian Barat tersebut merupakan salah satu persoalan yang masih mengganjal dalam penyelesaian kemerdekaan Indonesia. Hal ini akan sangat berpengaruh dalam perkembangan dan kelanjutan hubungan indonesia dan Australia.

Pernyataan Australia tersebut diatas bukanlah tanpa alasan yang mendasar, karena setelah invasi Jepang ke pulau New Guinea (Irian Barat dan Timur) setelah PD II masyarakat dan pemerintah Australia lebih meyakini bahwa pulau tersebut sangat penting bagi keamanan Australia. Sebab sebagai sama-sama bangsa kulit putih, Australia lebih mengenal

³ A. Khusyairi, *Politik Luar Negeri Australia Dibawah Pemerintahan Gough Withlam (1972-1975) dan hubungannya dengan Indonesia*, Disertasi Doktor di UGM, Yogyakarta, 1995, hlm 227

bangsa Belanda yang berada di dalam satu kubu bangsa Barat daripada bangsa Indonesia yang baru merdeka.

Antara tahun 1950-1962 merupakan titik yang paling rendah dalam sejarah hubungan Indonesia dan Australia. Pada masa itu Indonesia mengambil tindakan keras dalam masalah Irian Barat. Dapat dikatakan bahwa sengketa atas Irian Barat antara Indonesia dan Australia menjaji semacam unsur perusak dalam hubungan kedua negara.

Hal tersebut disebabkan oleh latar belakang Australia yang sedemikian rupa sehingga membentuk suatu opini tersendiri bagi masyarakat Australia secara keseluruhan terhadap Irian Barat. Apabila dilihat dari segi geografis, dataran Australia tiadak pernah memiliki tanah yang sama-sama yang berbatasan dengan Asia.⁴

Australia memiliki keyakinan bahwa pulau-pulau yang merentang disebelah utaranya merupakan garis lingkaran pertahanan terakhir bangsa terhadap agresi dari luar, serta garis Pasifik Selatan merupakan bidang kepentingan yang vital dari bahaya yang langsung dan tanggung jawab Australia.⁵

Terjadinya PD II terutama Perang Pasifik, akan memperkuat dan mempertahankan keyakinan bahwa Irian Barat dan pulau lainnya yang berdekatan akan selamanya sangat diperlukan bagi pertahanan Australia. Sebagai suatu keyakinan sebagaimana dengan kebijaksanaannya maka Australia menuntut adanya suatu hak mutlak untuk berkepentingan dengan apapun yang terjadi di Pasifik Selatan dan terutama memberikan pendapat tentang siapa yang sebaiknya menempati, membangun dan mengawasi Irian.

Adanya kepentingan Australia untuk memperoleh hak dalam memiliki pulau-pulau di Pasifik Selatan dapat dijelaskan lebih banyak

⁴ Ibid. hal 232

⁵ Ibid. hal 232

dikarenakan kerasnya tentangan Australia terhadap kontrol Indonesia di Irian Barat. Selama ini persengketaan mengenai Irian Barat juga berdampak ekspondensial terhadap hubungan Indonesia dan Australia.

Meskipun ada usaha dari pemerintah Australia agar Irian Barat terpisah dari hubungan kesatuan yang menyeluruh dengan Indonesia, persengketaan itu dalam masyarakat Australia masih menggambarkan citra Indonesia yang mengancam dan ekspansionis. Perselisihan antara kedua negara tersebut diperburuk oleh kecenderungan Australia yang memandang Indonesia adalah melalui prisma Irian Barat.

2.2 Pasang Surut Hubungan Indonesia dan Australia

Setelah masalah Irian Barat selesai, timbul gangguan baru terhadap hubungan Indonesia dan Australia yaitu dengan adanya konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia. Pada masa konfrontasi ini Australia berada dibawah posisi yang cukup sulit. Di satu sisi Australia terikat pada perjanjian pertahanan dengan Malaysia, namun disisi lain tetap ingin mempertahankan dan memelihara hubungan baik dengan Indonesia. Namun demikian, yang jelas Australia lebih cenderung untuk membantu Malaysia yang sama-sama berkedudukan sebagai negara anggota The British Commonwealth dan memiliki perjanjian keamanan. Bahkan Perdana Menteri Menzies menyatakan bahwa Australia siap membantu secara militer terhadap Malaysia.

Pada masa konfrontasi, Australia sempat mengirim tentara ke Serawak, bahkan sempat terjadi kontak senjata dengan pasukan Indonesia. Adanya peristiwa ini semakin menunjukkan kesungguhan Australia untuk membantu Malaysia dan memusuhi Indonesia. Walaupun demikian, hubungan antara Australia dan Indonesia tetap dipelihara dengan baik. Terutama setelah Irian barat masuk ke wilayah kedaulatan Indonesia.

Dengan masuknya Irian Barat ke wilayah Indonesia maka posisi Indonesia semakin kuat bagi kepentingan keamanan Australia.⁶

Antara tahun 1972-1988 hubungan Australia dan Indonesia diwarnai oleh beberapa permasalahan yang menyebabkan berfluktuasinya hubungan antara kedua negara tersebut. Masalah pertama yang paling mengganggu adalah masalah Timor Timur. Adanya penilaian yang obyektif mengenai masalah tersebut terhambat oleh kiasan yang keliru terhadap masalah Irian Barat sebagai perintisan intervensi Indonesia di Timor Timur

Dengan merujuk pada persengketaan dulu yang semakin menambah bobot pada perasaan anti Indonesia dan menyatakan keterlibatan Indonesia yang selanjutnya terjadi penggabungan bekas jajahan Portugal tersebut sehingga dianggap mendorong kecenderungan ekspansionisme, selanjutnya dapat menyingkirkan kemungkinan adanya perhatian sebagai kohesi nasional dan stabilitas regional.

Persoalan Timor Timur ini mulai mewarnai kebijakan luar negeri Australia selama masa jabatan kedua PM Whitlam, PM Koalisi Liberal-Country Fraser, dan PM Buruh Hawke. Dalam hal tersebut Whitlam menghendaki agar rakyat Timor Timur diberikan hak sepenuhnya untuk menentukan masa depannya sendiri.

Selain itu adanya tekanan yang berasal dari dalam negeri Australia juga menyebabkan persoalan Timor Timur ini menjadi tidak jelas, sehingga menyebabkan hubungan kedua negara menjadi renggang. Adanya tekanan tersebut semakin menambah kendala pada Canberra untuk menentukan sampai sejauh mana dan seberapa cepat dapat diterapkan dalam suatu kebijakan yang realistis dan pragmatis untuk menghilangkan bahwa bahaya Timor Timur sebagai suatu masalah yang kontroversial.

Kemudian lebih lanjut bahwa sebagaimana diusahakan untuk melihat kedepan pada hubungan kerjasama yang konstruktif dengan

⁶ Ibid. hlm 230-231

Indonesia, juga persoalan di Canberra semakin dipersulit oleh media nasional yang tidak melupakan dan tidak memaafkan tindakan Indonesia yang dianggapnya boleh dicela,

Sepanjang tahun 1980-an hubungan kedua negara selalu diganggu oleh persoalan Timor Timur. Sekalipun pemerintah Australia berusaha untuk memelihara hubungan baik dengan Indonesia namun media Australia dan beberapa kelompok penekan tidak menghendaki persoalan Timor Timur dihentikan. Selama tahun 1995, hubungan bilateral Indonesia dan Australia terjadi di beberapa tingkat dan sangat meluas. Hubungan "people to people"-nya memang belum dapat dikatakan kokoh, tetapi pondasinya ada.⁷

Tetapi walaupun ada kritik dari pemerintah di Jakarta apapun corak politiknya dan cenderung mengarah pada hal yang negatif, media Australia tidak dapat bertanggung jawab sendiri atas lemahnya gambaran mengenai Indonesia dalam masyarakat Australia. Namun demikian pada tingkatan pemerintahan, Australia berusaha untuk memperkuat hubungannya dengan Indonesia.

Meskipun kadang-kadang masih saja terjadi titik-titik pergesekan, tampak tanda-tanda bahwa iklim yang baik dan menyenangkan telah muncul untuk memperkuat hubungan kedua negara. Pada sisi yang positif pun, Australia tidak lagi melihat dirinya sebagai pos terdepan yang terpencil dan terdampar dalam lingkungan yang asing. Pada umumnya mereka telah memiliki keyakinan bahwa takdir mereka sangat bertalian dengan wilayah Asia Pasifik.

⁷ Kompas, *Krisis Hubungan Australia-Indonesia*, 6 Juli 1995

2.3 Timor Timur dan permasalahannya

Sejak awal penggabungan wilayah Timor Timur ke dalam wilayah RI pada tanggal 17 Juli 1976 sebagai propinsi yang ke-27 telah menimbulkan permasalahan yang kontroversial. Sebab dengan bergabungnya Timor Timur sebagai bagian dari wilayah Indonesia muncul berbagai pendapat baik yang pro integrasi maupun yang kontra dimana berasal masyarakat Timor Timur itu sendiri maupun dari dunia internasional.

Dengan bergabungnya Timor Timur ke wilayah Indonesia maka hal tersebut membutuhkan adanya suatu pengakuan baik secara de facto maupun secara de jure. Dalam hal ini banyak negara-negara yang tidak setuju dengan bergabungnya Timor Timur ke wilayah Indonesia salah satunya adalah Portugal. Hal ini disebabkan karena selama 450 tahun Timor Timur merupakan wilayah jajahan Portugal sedangkan daerah lainnya kecuali Timor Barat merupakan jajahan Belanda. Selain itu apabila dilihat dari sisi sudut pandang Portugal, bekas penjajah ini tentu saja tidak mau kehilangan muka begitu saja apabila ia melepaskan Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia.⁸

Karena itu Portugal dengan segala cara mengupayakan agar Timor Timur tidak masuk menjadi wilayah Indonesia, meskipun dari pihak Indonesia sendiri berpendapat bahwa sejak adanya Deklarasi Balibo 1975 para wakil rakyat Timor Timur telah menentukan pendapatnya bahwa Timor Timur ingin berintegrasi dengan Indonesia.

Namun disamping yang kontra terdapat juga negara ang pro terhadap berintegrasinya Timor Timur ke wilayah Indonesia. Seperti halnya Australia, bahwa negara tersebut siap untuk memberikan pengakuan secara de jure terhadap integrasi Timor Timur ke wilayah Indonesia. Dimana pengakuan tersebut akan diberikan sebelum dimulainya perundingan batas laut dan landas kontinen antara Indonesia

⁸ Kompas, *Kendala Diplomasi RI Soal Timor Timur*, Jakarta

dan Australia pada tahun 1979.⁹ Kesepakatan tersebut tercapai setelah terjadi perundingan selama dua hari antara Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmaja dengan Perdana Menteri Malcolm Fraser.

Mengenai hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia, Mochtar yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri mengakui bahwa hubungan kedua negara sedang mengalami kesulitan, khususnya akibat persoalan Timor timur yang dimulai sejak tahun 1976. Adanya pengakuan tersebut perlu diberikan, karena untuk menyelesaikan persoalan batas landas kontinen dengan Indonesia, Australia harus terlebih dahulu memberikan pengakuan secara *de jure* terhadap Timor Timur sebagai propinsi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena pantai sebelah selatan Timor Timur akan menjadi salah satu basis untuk pengukuran penentuan landas kontinen yang berhadapan dengan benua Australia. Dimana persetujuan tersebut tidak mungkin dibuat, kalau salah satu pihak tidak mengakui keabsahan salah satu dari unsur dasarnya.

Persoalan lain yang ada kaitannya dengan Timor Timur adalah mengenai masalah penyatuan keluarga bekas pengungsi dari wilayah tersebut. Dimana ketika terjadi perang saudara pada tahun 1975, sebagian dari penduduk Timor Timur mengungsi ke Australia dengan meninggalkan keluarganya di Timor Timur. Sebagai akibat dari terjadinya perang saudara di Timor Timur, pada masa itu di Australia terdapat sekitar 2500 orang pengungsi yang berasal dari Timor Timur. Yang sebagian besar dari mereka adalah warga keturunan Cina.

Meskipun pemerintah Australia sudah memberikan pengakuan secara *de jure* terhadap berintegrasinya Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia namun masih ada sebagian daripada masyarakat Australia yang tidak menyetujui terjadinya hal tersebut. Maka dengan dalih perikemanusiaan, dengan adanya kehadiran para pengungsi tersebut

⁹ Kompas, *Australia Siap Akui Timor Timur*, Jakarta, 18 Desember 1978

digunakan oleh pihak oposisi dalam negeri Australia untuk menekan pemerintahnya, agar mau mengusahakan keluarga-keluarga mereka yang masih berada di Timor Timur dapat dipersatukan.

Dalam menyoroiti perkembangan masalah pengungsi dan masalah Timor Timur pada umumnya media massa Australia termasuk di dalamnya radio Australia secara keseluruhan dapat dinilai tidak saja dapat merugikan bagi pihak pemerintah Indonesia, tetapi hal tersebut sudah mengarah kepada kampanye anti kepada Indonesia. Hal ini dirasakan semakin meningkat terutama setelah terjadinya peristiwa terbunuhnya lima orang wartawan asal Australia di Balibo, Timor Timur.¹⁰

Dalam menanggapi perkembangan tersebut, semula pemerintah Indonesia masih menahan diri untuk tidak melayani perlakuan dari media massa Australia terhadap Indonesia, karena pemerintah Indonesia beranggapan bahwa hal tersebut memang merupakan cara mereka, sebagai penganut pers Barat yang bebas. Dan hal tersebut akan terus berlangsung demikian, dimana media massa Australia akan membawakan suara golongan siapapun yang menjadi oposisi di Australia, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada saat itu pemberitaan media massa Australia tidak harus mencerminkan kebijaksanaan pemerintahannya, khususnya mengenai masalah Timor Timur.

Salah satu permasalahan di Timor Timur yang selalu menjadi topik perdebatan selain hal tersebut diatas yaitu ketika terjadinya peristiwa pembunuhan terhadap lima orang wartawan asal Australia di Bilabo, Timor Timur. Dimana dengan terjadinya peristiwa tersebut telah menimbulkan kemarahan bagi masyarakat Australia sehingga mempengaruhi hubungan bilateral antara kedua negara. Masyarakat Australia menganggap bahwa terjadinya peristiwa tersebut benar-benar merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

¹⁰ Pelita, *Pengakuan kembali Keluarga Timor Timur*, Jakarta, 12 Desember 1978

Sebuah laporan pers dari Melbourne yang telah mengungkapkan pendapat Sir Keith Shann, seorang mantan duta besar Australia di Indonesia, yang berkaitan dengan soal kematian lima orang wartawan Australia di Timor Timur pada tahun 1975. Dalam wawancara dengan AFP yang dikutip oleh Antara Sir Keith menyatakan bahwa wartawan-wartawan Australia tersebut telah pergi ke Timor Timur padahal sebelumnya mereka telah dilarang untuk datang ke Timor Timur. Mereka bahkan telah mengenakan seragam Fretilin ketika datang ke wilayah tersebut.

Sir Keith juga menyatakan bahwa bekas Perdana Menteri Gough Whitlam dan Perdana Menteri Malcolm Fraser telah memberikan dorongan kepada pemerintah Indonesia atas rencananya terhadap bekas koloni Portugal tersebut. Walaupun, kedua pemimpin Australia tersebut tidak menyukai digunakannya tindakan militer, keduanya jelas menerima integrasi Timor Timur dengan Indonesia.

Adanya ungkapan Sir Keith Shann tersebut dapat memberikan bahan baru bagi salah satu persoalan yang agaknya mempengaruhi dalam hubungan Indonesia dan Australia pada tahun-tahun terakhir. Dimana dalam sejarah pers Australia mungkin baru sekali ini lima orang wartawannya tewas sekaligus dan dikubur bersama dalam satu kuburan. Mereka tewas karena tertembak selagi terjadi pertempuran antara barisan fretilin dan barisan penentangannya. Kubur massal mereka berada di tanah Kusir, Jakarta.¹¹

Meskipun Sir Keith Shann memberikan suatu keterangan namun tentu saja keterangan tersebut merupakan keterangan pribadi dalam menanggapi persoalan tersebut bukan dalam konteks mewakili pemerintah Australia. Dalam politik resmi Australia ialah tetap menghendaki adanya *clearance* atau *kejelasan* atas persoalan tersebut, sekalipun tidak sebagai tuntutan politik yang mutlak.

¹¹ Merdeka, dalam artikel "*Pendapat yang Jujur*", Jakarta, 16 Oktober 1981

Hal ini mungkin disebabkan karena adanya tekanan dari Persatuan Wartawan Australia. Akan tetapi pihak Persatuan Wartawan Australia sendiri tidak secara terbuka dalam menentukan sikapnya. Dalam hubungan kerja mereka tetap memiliki hubungan yang baik dengan persatuan Wartawan Indonesia.

Sedangkan bagi pemerintah Indonesia sendiri tentu saja ini menetralsir hal tersebut dan berusaha agar peristiwa tersebut telah dianggap selesai. Kalaupun ada clearance itu akan ada sambil jalan. Tampaknya dengan adanya keterangan pers dari Sir Keith Shann tersebut merupakan salah satu cara untuk membantu usaha clearance tersebut

Ada sesuatu yang kontroversial di balik pernyataan pers tersebut. Bahwa dengan melanggar larangan untuk pergi ke Timor Timur serta memihak kepada fretilin dengan menggunakan seragam mereka, wartawan-wartawan Australia tersebut tidak hanya sengaja menanggalkan sikap tradisional pers yang selalu netral tetapi juga secara tidak langsung ingin melibatkan Australia secara tidak langsung dalam konflik tersebut.

Pembelaan pemerintah Australia atas tewasnya wartawan-wartawan mereka dapat menimbulkan suatu penafsiran ganda dimana di satu pihak pemerintah Canberra melakukan hal tersebut untuk membela warga negaranya tetapi dilain pihak apabila tidak dijaga secara hati-hati, maka orang dapat beranggapan bahwa pemerintah Australia secara tak langsung membela serta menyetujui sikap warga negaranya tersebut.

Apabila melihat pada kenyataannya bahwa sudah menjadi realitas politik bahwa Timor Timur telah menjadi propinsi ke-27 Indonesia. Perkembangan selam beberapa waktu telah membawa pergeseran baru di dalam fikiran internasional mengenai masalah tersebut. Hal tersebut akan menjadi suatu formalitas semata apabila masalah tersebut dipersoalkan di PBB.

Sedangkan bagi Australia ada baiknya bila dalam memperhitungkan faktor perkembangan regional di masa mendatang, untuk tidak

memaksakan diri dalam mempertahankan suatu sikap yang sudah terlewati oleh realitas baru yang mempunyai arti bagi kepentingan jangka panjang dalam pembentukan keseimbangan kekuatan di wilayah Asia Tenggara. Selain itu seyogyanya Australia tidak perlu lagi bermuka dua dalam menanggapi permasalahan Timor Timur.





BAB III

PEMBATALAN HBL. MANTIRI SEBAGAI DUTA BESAR DI AUSTRALIA OLEH PEMERINTAH INDONESIA

3.1 Kondisi Politik Dalam Negeri Kedua Negara

3.1.1 Kondisi Politik Dalam Negeri Australia.

Apabila melihat kepada kondisi politik dalam negeri di Australia, terutama menjelang pemilu 1996 dapat dikatakan akan menimbulkan suatu perubahan-perubahan. Bahwa dalam setiap pemilu yang dilaksanakan dalam sistem pemerintahan demokrasi parlementer telah selesai yang dimenangkan oleh pihak oposisi maka secara otomatis akan terjadi suatu perubahan kabinet. Serta dapat dipastikan akan adanya suatu perubahan di dalam garis kebiaksanaan politiknya, baik yang menyangkut politik dalam negeri maupun politik luar negeri.

Seperti halnya di Australia yang tahun ini akan melaksanakan pemilu tentunya kondisi politik dalam negerinya akan mengalami perubahan. Terutama dengan adanya persaingan yang ketat antara Partai Koalisi Liberal-Nasional dan Partai Buruh. Dalam pemilu yang akan dilaksanakan ini merupakan tahun yang cukup berat bagi kepemimpinan Perdana Menteri Paul Keating. Dimana apabila dalam pemilu tahun ini dimenangkan oleh Partai Koalisi Liberal-Nasional maka hal yang dimungkinkan terjadi adalah hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia akan menjadi renggang selain itu kebijakan luar negeri dari Partai Koalisi Liberal-Nasional akan lebih memfokuskan perhatiannya kepada Jepang.¹

Adanya pergantian kepemimpinan tersebut akan menyebabkan berubahnya orientasi kebijakan politik Australia baik dalam maupun luar negeri, terutama yang berkaitan dengan kawasan Asia Pasifik. Bahwa selama ini semua kemajuan yang diperoleh Australia dengan negara tetangganya di kawasan Asia Pasifik serta partisipasinya di kawasan ini

¹ Kompas, *Posisi Keating Terancam Dalam Pemilu Tahun Ini*, Jakarta, 28 Januari 1996

terjadi selama Australia berada dibawah kepemimpinan Partai Buruh. Sedangkan Partai Koalisi Liberal-Nasional selama ini lebih memfokuskan perhatiannya kepada kawasan Eropa dan Amerika.²

Melihat kepada pesta demokrasi yang akan berlangsung di Australia peluang daripada Partai Koalisi Liberal-Nasional memiliki peluang yang lebih besar daripada peluang yang dimiliki oleh Partai Buruh. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pengumpulan pendapat yang menunjukkan bahwa John Howard lebih difavoritkan sebagai Perdana Menteri Australia daripada Keating.

Selain itu yang perlu untuk diketahui bahwa ditingkat negara bagian, hanya negara bagian Queensland dan Capital teritory yang masih dikuasai oleh Partai Buruh. Sementara di negara bagian Australia Barat, Australia Selatan, Tasmania, Victoria, New South Wales dan Northern Teritory semuanya telah dikuasai oleh Partai Koalisi Liberal-Nasional.³

Berdasarkan atas polling Herald-Mcnair yang menanyai sejumlah dua ribu orang Australia mengenai siapa yang akan menjadi perdana menteri yang lebih baik menunjukkan bahwa sekitr 49% memilih Howard dan 43% memilih Keating. Hal ini berbeda dengan mantan pimpinan partai Koalisi liberal-Nasional yang digantikan Howard, yaitu Alexander Downer dimana ia hanya memperoleh dukungan sebanyak 19% dalam polling tersebut.

Sejak Partai Koalisi Liberal-Nasional memerintah pada tahun 1983, John Howard yang telah terpilih merupakan pimpinan yang kelima. Sementara ini dari pihak Partai Buruh hanya ganti pimpinan sebanyak dua kali. Tetapi dalam pemilu kali ini menurut analisa para pakar politik Australia kombinasi antara John Howard dan wakilnya Peter Costello

² Ibid.

³ Kompas, *Pergantian Kepemimpinan Oposisi Australia, Prospek Hubungan RI- Australia*, Jakarta, 29 Januari 1996

dipandang sebagai saingan yang berbobot bagi Perdana Menteri Paul Keating dan Partai Buruh.

Situasi politik yang sedang terjadi di Australia pada waktu itu telah memberikan dampak yang cukup besar bagi Australia. Dimana pada saat itu menjelang pemilu telah begitu banyak perubahan yang terjadi dalam politik domestik Australia.

Adanya persaingan yang cukup ketat antara Partai buruh dan partai Koalisi Liberal-Nasional untuk memperoleh posisi puncak di Australia menyebabkan banyak hal yang terjadi. Dimana untuk memperoleh posisi yang diinginkan masing-masing partai tidak akan melepaskan setiap isu-isu politik yang terjadi di Australia, terutama yang berkaitan dengan kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah Australia.

Masing-masing partai akan berusaha untuk mempertahankan dan merebut posisi dengan menggunakan isu-isu politik yang sedang menjadi topik pembicaraan di Australia. Seperti halnya partai Buruh yang diwakili oleh Perdana Menteri Paul Keating akan berusaha mempertahankan posisinya, begitu pula dengan Partai Koalisi Liberal-Nasional yang berusaha mengambil alih posisi kepemimpinan di Australia dengan melakukan banyak memberikan tekanan-tekanan terhadap segala kebijakan politik yang diambil oleh pemerintahan Keating baik yang bersifat ke dalam maupun keluar.

Adanya tekanan-tekanan yang diberikan oleh Partai Koalisi Liberal-Nasional terhadap kepemimpinan Keating memberikan dampak yang cukup besar bagi pemerintahan Keating itu sendiri. Hal ini secara otomatis juga akan berpengaruh terhadap hubungan Australia dengan negara-negara di kawasan Asia, khususnya dengan Indonesia. Dimana Partai Koalisi Liberal-Nasional juga memberikan perhatian yang cukup tajam mengenai hal tersebut.

Dalam hal ini selama masa kepemimpinan Perdana Menteri Paul Keating, Partai Koalisi Liberal-Nasional menganggap bahwa pemerintahan

Keating terlalu memfokuskan perhatiannya pada kawasan Asia Pasifik. Terutama yang berkaitan dengan gagasan daripada Keating untuk mengarahkan kepada integrasi serta menempatkan Australia secara geografis sebagai bagian dari kawasan Asia Pasifik.

Tentunya hal ini sangat bertentangan dengan visi dan misi dari Partai Koalisi Liberal-Nasional yang beranggapan bahwa gagasan tersebut terlalu maju dan melesat meninggalkan suara hati dan tuntutan sebagian besar masyarakat Australia. Sehingga dengan latar belakang serta nuansa haluan yang prioritasnya berbeda, maka partai koalisi liberal-nasional akan memformulasikan kembali gradasi perubahan yang terjadi pada masyarakat Australia secara lebih pelan dan mendalam, serta kebijakan politik luar negerinya akan kembali bergeser condong kembali untuk lebih mengutamakan pada kawasan Eropa dan Amerika Serikat.⁴

Selain hal tersebut diatas timbul suatu kejenuhan atas perubahan-perubahan yang telah dilakukan oleh kabinet Keating, serta jenuh pula terhadap Perdana menteri Keating itu sendiri. Hal ini disebabkan karena apa yang diinginkan oleh masyarakat Australia ternyata tidak sejalan dengan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Keating.

Dimana mayoritas pemilih di Australia sudah jenuh terhadap perubahan-perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan ingin mengubahnya dengan perubahan-perubahan yang baru yaitu ingin kembali kepada suatu situasi sistem pemerintahan yang lebih rileks dan nyaman. Tidak selalu merasa tegang serta lebih menyenangkan dan merasa terlindungi.⁵

Maka dengan memanfaatkan hal tersebut maka Partai Koalisi Liberal-Nasional berusaha untuk menekan Partai Buruh. Dimana Partai Koalisi Liberal-Nasional berusaha untuk membentuk suatu opini publik

⁴ Kompas, *Tahap Baru Hubungan Australia-Indonesia*, Jakarta, April 1996

⁵ Suara Merdeka, *Hasil Pemilu Australia dan Pengaruhnya*, Jakarta, 16 Maret 1996

guna merebut simpati, popularitas, dan dukungan politik serta menyadari terhadap psikologi massa yang sedang mengalami titik jenuh.

Namun meskipun demikian apapun hasil akhirnya, mungkin ada beberapa garis politik lama yang akan dilanjutkan tetapi bagaimanapun juga adanya change atau suatu perubahan harus tetap terjadi serta disadari. Sekalipun tentunya ada suatu garis continuity, yaitu garis kontinuitas yang tetap dipertahankan oleh pemerintahan yang baru.



3.1.2 Kondisi Politik Dalam Negeri Indonesia

Kondisi politik dalam negeri di Indonesia selama masa kepemimpinan presiden Suharto berada dalam situasi yang relatif stabil meskipun pada kenyataannya banyak persoalan-persoalan dalam negeri yang harus segera untuk diselesaikan. Dimana persoalan-persoalan tersebut dapat mengganggu baik stabilitas politik maupun stabilitas pertahanan nasional. Hal ini sangat berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang meliputi seluruh wilayah Indonesia dimulai dari wilayah barat ataupun wilayah timur.

Selama ini kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia lebih banyak terfokuskan pada wilayah Barat, terutama pada ibukota negara, yaitu Jakarta. Sehingga pembangunan yang selama ini dilaksanakan terkesan mengesampingkan terhadap wilayah timur Indonesia. Atau dengan kata lain bahwa persoalan dalam negeri Indonesia diawali dengan adanya kesenjangan atas kesejahteraan antara wilayah Indonesia barat dan wilayah Indonesia timur.

Adanya permasalahan tersebut lama kelamaan menimbulkan suatu konflik nasional yang dapat menimbulkan gejolak serta membawa pengaruh yang besar dalam situasi politik domestik di Indonesia.

Apabila melihat kepada sejarah perjalanan politik di Indonesia, tidak kurang dari 25 kabinet yang memerintah di Indonesia selama Indonesia merdeka.⁶ Dari jumlah tersebut hanya 7 kabinet yang berhasil memerintah selama jangka waktu 12 bulan sampai 23 bulan lalu terdapat 12 kabinet yang hanya bisa bertahan antara 6 sampai 11 bulan. Dan 6 kabinet yang berumur antara 1 sampai bulan. Demikian salah satu gambaran dari ketidak stabilan politik di Indonesia, yaitu dilihat kesempatan yang tersedia

⁶ Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia Kestabilan Peta kekuatan Politik dan Pembangunan*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hlm 1

bagi setiap pemerintah (kabinet) untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang dihadapinya.

Pada masa lampau ketidakstabilan yang terdahulu lebih bersumber kepada adanya kelemahan daripada para elit politik untuk bekerja sama satusama lain, maka pada saat ini lebih disebabkan oleh belum melembaganya struktur dan prosedur politik yang mampu untuk memberikan tempat kepada masyarakat luas dalam mengambil bagian di dalam proses politik.

Dalam hal ini orang akan lebih cepat setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa ketidakstabilan politik yang dialami oleh Indonesia semakin memperkecil keleluasaan bagi negara ini untuk mengadakan perbaikan-perbaikan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik. Oleh karena itu adalah logis apabila program politik dari orde baru pada awal kekuasaannya adalah untuk menegakkan kestabilan politik untuk memberikan landasan kepada pembangunan.

Dalam mempelajari hubungan antara perkembangan ekonomi dan demokrasi, negarawan dan penelitian politik barat datang kepada suatu kesimpulan bahwa masalah politik yang penting pada masa ini bersumber dari perkembangan industri yang cepat.⁷

Bagi Indonesia yang memiliki penduduk dimana sebanyak 70% hidup dari sektor pertanian, hal ini merupakan suatu permasalahan yang kompleks. Dimana dengan adanya permasalahan tersebut sulit untuk dibantah bahwa adanya usaha untuk meningkatkan hasil dari sektor pertanian guna mendampingi perkembangan industri, dengan harapan supaya daya serap sektor pertanian terhadap tenaga kerja semakin meningkat.

Sebagai contoh, Jerman sebelum Perang Dunia pertama merupakan salah satu negara yang berhasil mengembangkan sektor industri dengan cepat sekali. Dengan perkembangan sektor industri yang cepat tersebut

⁷ Dikutip dari : *Ibid.* hlm.2

memperbesar jumlah buruh yang tidak ahli yang berasal dari pedesaan, hal ini disebabkan karena masyarakat tidak mampu menyediakan tenaga ahli sesuai dengan kecepatan perkembangan kebutuhan industri akan tenaga ahli. Akibatnya pengangguran menjadi masalah politik yang perlu segera diselesaikan.

Hal inilah yang merupakan salah satu sebab dari penerimaan masyarakat terutama kaum buruh kepada Hitler dengan harapan Hitler akan membawa kepada perubahan yang mendasar bagi sistem politik dan sosial Jerman pada waktu itu. Perubahan memang terjadi akan tetapi masyarakat Jerman perlu untuk memberikan suatu pengorbanan yang lebih besar lagi, sehingga menghasilkan perang dunia.

Berdasarkan contoh diatas maka dapat diambil suatu asumsi bahwa permasalahan yang sedang terjadi di Indonesia bukanlah bagaimana menyeimbangkan antara daya serap tenaga antara kedua sektor tersebut. Pokok permasalahannya adalah bagaimana menyeimbangkan antara daya serap tenaga kerja dari semua sektor ekonomi dengan persediaan tenaga kerja yang ada dalam masyarakat.

Adanya kecenderungan ini menyebabkan tumbuhnya suatu potensi yang radikal pada petani di pedesaan dan lapisan bawah di kota, karena disebabkan adanya rasa ketidakpuasan serta perasaan tidak aman tentang kehidupan baik masa kini maupun masa yang akan datang.

Masyarakat yang berada di dalam kondisi tersebut diatas secara tidak langsung akan lebih mudah tergoda untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan seperti huru-hura, pemberontakan, pembunuhan yang bersifat politis, revolusi dan sebagainya. Apalagi sekiranya kepada masyarakat yang berada didalam suasana seperti diatas ditunjukkan oleh sekelompok tertentu dalam masyarakat yang menjadi penyebab dari segala suasana yang terjadi. Maka dengan cepat kekerasan tersebut akan terjadi terhadap kelompok tersebut walaupun tindakan tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi.

Apabila dikaji lebih lanjut perkembangan politik di Indonesia semenjak merdeka, perhatian masyarakat terhadap politik lebih banyak terfokus daripada perhatian terhadap perkembangan ekonomi. Adanya revolusi 45 dan rezim demokrasi terpimpin banyak memberikan pengaruh terhadap perubahan masyarakat secara revolusioner, anti imperialis dan sebagainya dimana semuanya lebih mengarahkan perhatian masyarakat kepada masalah politik daripada ekonomi. Dan keadaan ini terus berlangsung selama tahun 1965.⁸

Maka dengan demikian terlihat adanya kecenderungan tidak terdapatnya perimbangan antara partisipasi politik dan perkembangan ekonomi di Indonesia sampai tahun 1965. Maka dalam hal ini malah partisipasi politik lebih dahulu bergerak daripada perkembangan ekonomi. Oleh karena itu seringkali timbul suatu isu politik yang dilatarbelakangi oleh masalah-masalah ekonomi yang menyebabkan guncangan situasi politik.

⁸ Dikutip dari : *Ibid.* hlm 4

3.2 Faktor-faktor yang menyebabkan batalnya HBL Mantiri sebagai Duta Besar di Australia

3.2.1 Faktor Politis

Dengan dibatalkannya HBL Mantiri sebagai duta besar di Australia oleh pemerintah Indonesia, maka untuk sementara posisi duta besar di Canberra kosong. Dengan kosongnya posisi tersebut maka mempengaruhi terhadap hubungan kedua negara. Namun kebijakan pemerintah Indonesia dengan membatalkan pencalonan tersebut berdasarkan atas beberapa pertimbangan, salah satunya adalah dengan melihat kepada kondisi politik domestik daripada Australia menjelang pemilu.

Apabila melihat pada kenyataan yang sebenarnya tentang pembatalan pencalonan Mantiri tersebut banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor politis. Alasan utama yang dikemukakan oleh pemerintah Australia yang merasa keberatan atas pencalonan Mantiri tersebut adalah yang berkaitan dengan pernyataan Mantiri mengenai insiden Dilli tahun 1991. Dalam wawancaranya tersebut Mantiri menyatakan bahwa "Kita tidak menyesalkan apa-apa. Apa yang terjadi sudah semestinya... Mereka menentang kita, berdemonstrasi, sambil meneriakkan yel-yel anti pemerintah. Untuk saya hal ini sama dengan pemberontakan, karena itu kita mengambil tindakan yang tegas."⁹

Karena alasan tersebut maka Australia merasa keberatan atas pencalonannya sebagai duta besar di Australia dan menganggap bahwa Mantiri sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap terjadinya insiden tersebut.

Bila dilihat dari hubungan bilateral kedua negara, masalah Timor Timur memang telah menjadi kerikil di dalam membina kerjasama di bidang politik antara Indonesia dan Australia. Mengingat Timor Timur merupakan wilayah yang terdekat dengan Australia. Maka pemerintah

⁹ Kompas, *HBL Mantiri, Saya Siap Berangkat ke Australia*, Jakarta, 3 Juli 1995

dengan berbagai upaya untuk menghilangkan persepsi yang salah mengenai Indonesia di Australia yang berkaitan dengan masalah Timor Timur.

Tetapi bagaimanapun juga di dalam sejarah hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia memang selalu mengalami fluktuasi yang selalu terjadi pada setiap waktu dan mempunyai resultan baik yang negatif maupun yang positif. Masalah Timor Timur selalu saja menjadi ganjalan di dalam hubungan kedua negara.

Pada tanggal 7 Desember adalah salah satu tanggal yang bisa dijadikan momentum untuk mengingatkan kembali akan masalah Timor Timur, dimana tanggal tersebut diperingati sebagai hari masuknya militer Indonesia ke Timor Timur pada tahun 1975. Bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu dan gerakan anti integrasi di Australia, hari tersebut merupakan saat yang tepat untuk beraksi. Gerakan-gerakan mereka tersebut kemudian dimanfaatkan untuk menekan pemerintah Indonesia.¹⁰

Penunjukan dua besar yang dilakukan hanya sehari menjelang tanggal tersebut merupakan suatu langkah untuk mengeliminir kemungkinan terburuk dari gerakan-gerakan yang berusaha untuk mendiskreditkan Indonesia dengan basis di Australia dan bahkan digunakan sebagai suatu alat penekan oleh pemerintah Australia.

Selain itu problematika rumit yang menyangkut tentang Timor Timur juga tercermin di dalam rencana Australia untuk melakukan investigasi atas kematian lima wartawan mereka yang tewas di Balibo, Timor Timur. Pemerintah Australia untuk kepentingan ini telah membentuk *Australian National Crime Authority* yang dipimpin oleh Tom Sherman.

Sedang bagi Indonesia apabila hal tersebut dilaksanakan apapun hasilnya akan semakin memperburuk pada citra tentang posisi Indonesia

¹⁰ Kedaulatan Rakyat, *Menggugah Skenario Duta Besar Indonesia untuk Australia*, Jakarta, 11 Desember 1995

di dunia Internasional. Motivasi pemerintah Australia untuk melakukan investigasi ini semakin tidak terlalu jelas, kecuali untuk membuktikan pada sebagian masyarakat Australia yang merasa tidak puas terhadap penjelasan bahwa para wartawan tersebut terjebak di dalam baku tembak yang terjadi secara tidak disengaja.

Mengenai rencana investigasi tersebut ternyata lebih dilatarbelakangi untuk mengikuti kemauan kelompok di Australia di satu pihak, sementara dipihak lain digunakan untuk menekan pemerintah Indonesia. Dimana pemerintah Australia masih mempunyai target politik di dalam hubungan politik bilateral dengan Indonesia yakni mengenai persoalan penunjukkan duta besar yang belum berlangsung. Kartukomisi sherman tersebut pada akhirnya digunakan sebagai trade-off dengan pengangkatan duta besar bagi Australia.

Pihak-pihak australia yang meributkan tentang pencalonan mantiri memang tidak bertanggung jawab. Namun pemerintah Indonesia hendaknya memahami. Hal ini disebabkan Australia merupakan negara dengan sistem politik demokrasi parlementer. Dimana di dalam sistem tersebut pemerintah setiap saat dapat di jatuhkan oleh parlemen. Dan sebaliknya parlemen setiap saat dapat dibubarkan oleh perdana menteri.

Dalam hal ini perdana menteri dari partai buruh, Paul Keating bukanlah pemerintahan yang populer. Hal ini dapat dilihat dari berita-berita, analisis, editorial yang isinya mengecm keras terhadap pemerintahan Keating.¹¹

Namun begitulah yang terjadi pada setiap pemerintahan di negara yang menganut sistem politik demokrasi parlementer. Dimana pertarungan kekuasaan antara pemerintah dan oposisi di parlemen selalu terjadi. Partai-partai oposisi selalu berupaya keras untuk menggalang kesatuan dalam menjatuhkan pemerintahan yang sedang berjalan. Dengan tujuan untuk mengambil alih kekuasaan.

¹¹ Jayakarta, *Soal Mantiri pakai kepala Dingin*, Jakarta, 8 juli 1995

Pemerintah yang demikian biasanya tidak bisa bertahan dengan lama. Sebagai contoh apa yang terjadi di Jepang, Italia dan Thailand. Dimana pemerintah jatuh silih berganti, pemerintahan John Major (Inggris) pun hampir saja terguling yang disebabkan karena adanya perpecahan di dalam partai konservatif yang sedang dipimpinnya.

Setiap kali muncul isu politik bisa dijadikan sebagai alat untuk menghantam pemerintah, pihak oposisi pasti akan mengangkatnya dan mengekspos secara besar-besaran. Timor Timur senang atau tidak senang, sampai saat ini memang masih dipermasalahkan oleh kelompok-kelompok tertentu di Australia. Pemerintahan Keating sendiri sudah cukup bersahabat dengan Indonesia. Bahkan secara pribadi ia mempunyai hubungan yang baik dengan presiden Suharto.

Namun di dalam menanggapi pencalonan Mantiri sebagai duta besar di Australia pemerintahan Keating segera menyadari bahwa posisinya sedang terancam karena hal tersebut berkaitan dengan masalah Timor Timur. Sebab apabila pemerintahan Keating tidak pandai menggalang kekuatan untuk menghadapi pihak oposisi, maka dalam pemilu mendatang partai buruh akan mengalami kekalahan.

Hal ini dapat dilihat dari pandangan Menteri Luar Negeri Gareth Evans yang tampak mendua. Dimana pandangannya sangat berbeda dalam menanggapi pencalonan Mantiri daripada yang dikemukakan oleh Keating. Bahwa di parlemen tanggal 29 juni yang lalu Keating menegaskan bahwa pemerintahnya tidak menolak atas nominasi dari pencalonan Mantiri sebagai duta besar di Australia.

Ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan di dalam menjelaskan daripada sikap Evans tersebut. Pertama, adalah untuk meredakan atau meredam kontroversi di dalam kalangan intern dari Partai Buruh itu sendiri, yang tampaknya kurang setuju atas pencalonan Mantiri.

Sedangkan kemungkinan kedua adalah dengan berdasarkan atas pertimbangan perpolitikan pribadi dari Evans sendiri.¹²

Sikap tersebut merupakan langkah prakampanye dalam pemilu tahun depan, dimana Evans berniat pindah dari majelis tinggi (senat) ke majelis rendah. Perpindahan ini tentunya akan memberikan peluang baginya untuk dapat mencalonkan diri sebagai perdana menteri.

Dengan mengambil posisi sejalan dengan para pengkritiknya, tampaknya ia ingin merangkul suara-suara dari kelompok masyarakat di Australia yang selama ini menuduh tentang HAM dan timor timur di Indonesia terlalu lunak. Maka dengan menunjukkan sikapnya yang kurang setuju atas penunjukan Mantiri, tampaknya Evans ingin mengubah citra lembeknya.

Terlepas dari adanya perbedaan pandangan antara Keating dan Evans, kenyataan ini tampaknya memberikan pemahaman terhadap latar belakang dibatalkannya Mantiri sebagai duta besar di Australia. Meskipun terjalin suatu hubungan pribadi yang baik antara Keating dan Suharto, hubungan yang lebih kukuh antara kedua negara membutuhkan faktor-faktor subjektif lainnya yaitu terjadinya hubungan yang baik pada level masyarakat. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, terbukti bahwa Timor Timur dan hak asasi manusia merupakan persoalan yang masih terasa sensitif dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia.

Jika demikian halnya maka persoalan tersebut perlu untuk diberi perhatian secara lebih sungguh-sungguh. Seorang calon duta besar yang akan ditempatkan di Australia harus mampu untuk menarik kepercayaan dan simpati dari pemerintah maupun masyarakat Australia. Karena pada tingkatan pemerintah telah terjalin suatu hubungan yang cukup baik. Kepercayaan merupakan faktor yang terpenting karena melalui

¹² Suara Merdeka, *Makna Penunjukan Dubes Baru RI untuk Australia*, Jakarta, 12 Desember 1995. hlm.6

kepercayaan akan memudahkan seorang diplomat di dalam menjalankan tugasnya. Dimana ia harus mampu untuk menjalin dan mengembangkan hubungan kerjasama yang lebih baik antara Indonesia dan australia.

Adanya ketidakmampuan di dalam menjelaskan persoalan Timor timur dan hak asasi manusia kepada Australia akan menjadi faktor hambatan bagi Australia dan Indonesia untuk berkonsentrasi dalam mengembangkan dan memperkuat hubungan dan kerjasama bilateral dan regional. Dan ia akan muncul sebagai gangguan bagi Canberra dan Jakarta.



3.2.2 Faktor non politis

Selain faktor politis juga terdapat faktor non politis yang sedikit banyak mempengaruhi pemerintah Indonesia di dalam membatalkan pencalonan HBL Mantiri sebagai duta besar Indonesia untuk Australia. Dimana selain masalah politis adanya persoalan perbedaan budaya dan sistem nilai dapat menyebabkan gangguan bagi hubungan kedua negara itu sendiri.

Adanya perbedaan budaya dan sistem nilai antara Indonesia dan Australia seringkali menimbulkan adanya kesalahpahaman di dalam memandang suatu permasalahan antara kedua negara. Terutama dalam hal menyampaikan pendapat, dimana budaya serta kebiasaan antara kedua negara sangat jauh berbeda.

Apabila dibandingkan, di dalam menyampaikan pendapat, orang Australia selalu berberbicara dengan terus terang. Bilamana tidak setuju tentang sesuatu hal mereka akan menyatakannya secara langsung begitu juga dengan sebaliknya. Sedangkan di dalam budaya diplomasi kita tidak mengenal tentang hal tersebut.¹³

Australia yang memiliki latar belakang sebagai negara demokrasi yang terbiasa dengan keterbukaan dan tranparansi dalam segala hal. Hal ini tentunya berbeda dengan Indonesia meskipun termasuk negara yang menganut dalam kategori negara demokrasi, namun di dalam prakteknya tidak benar-benar demokrasi dan terbuka.

Apabila dilihat dari segi geografis politik Indonesia, tampak ada dua kawasan yang berpengaruh. Di sebelah timur membentang negara-negara kawasan pasifik, di utara adalah negara-negara yang berada di semenanjung Asia Tenggara, di sebelah barat membentang samudera hindia, sedangkan di selatan ada Australia. Untuk kawasan utara dan barat,

¹³ Tempo, *Persoalan Internal Bisa menjadi Sandungan Hubungan Indonesia-Australia*, Jakarta, 13 Agustus 2001

Indonesia relatif tidak mengalami kesulitan untuk beradaptasi. Indonesia akan relatif lebih mudah di dalam memecahkan persoalan dengan seluruh negara di Asia Tenggara karena telah tergabung di dalam ASEAN. Bahkan untuk kepentingan ekonomi, jalur laut Cina Selatan lebih banyak berfungsi bagi Indonesia daripada samudra Hindia.¹⁴

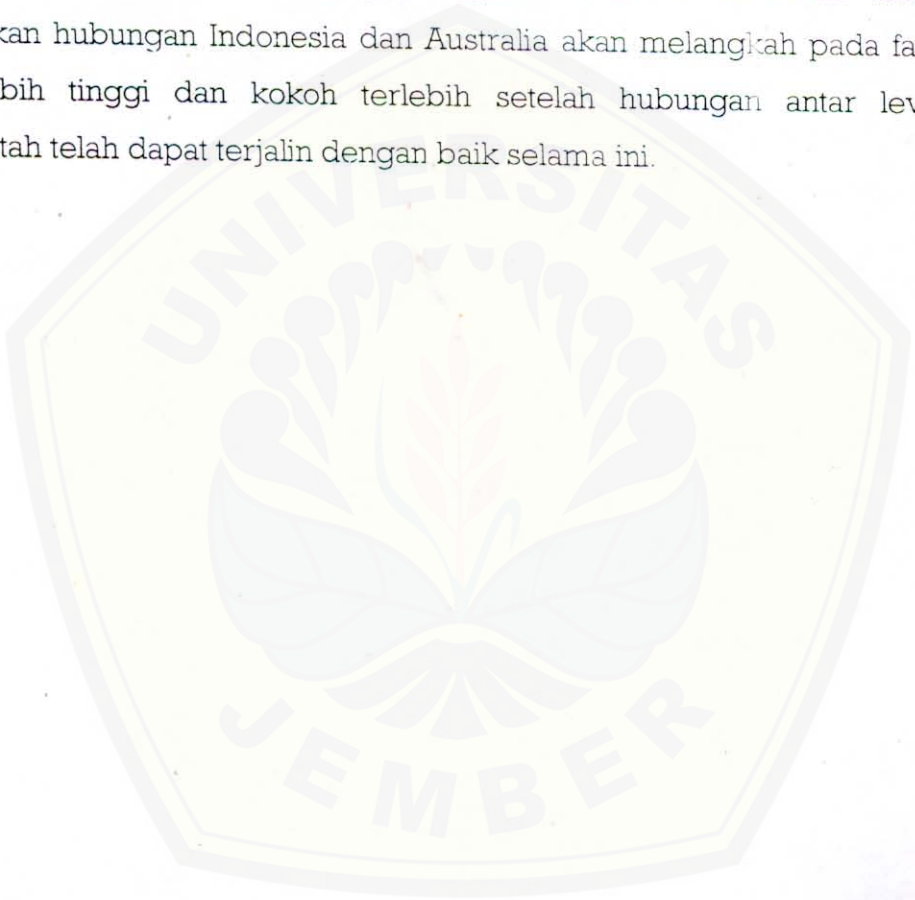
Sedangkan Australia adalah negara yang berada di selatan dengan memiliki kultur Eropa yang paling dekat dengan Indonesia. Adanya kesamaan kultur dengan eropa itulah yang harus di waspadai oleh Indonesia karena dengan kesamaan tersebut Australia lebih mudah dalam melakukan hubungan dengan negara-negara di kawasan Eropa dan amerika, dimana di wilayah tersebut masalah mengenai hak asasi manusia dan demokrasi merupakan hal yang menjadi perhatian utama.

Hal tersebut berkaitan dengan kasus penolakan HBL mantiri sebagai duta besar di Australia dimana pada akhirnya pemerintah Indonesia membatalkan pencalonan tersebut karena adanya perasaan yang tidak nyaman dari pemerintah Indonesia yang diikuti dengan ketidakmampuan dari pemerintah indonesia untuk menjelaskan tentang masalah Timor Timur dan hak asasi manusia.

Karena perbedaan kultur tersebut pemerintah Australia menginginkan adanya suatu kejelasan mengenai masalah Timor timur terutama yang berkaitan dengan pernyataan Mantiri dalam wawancaranya dengan editor pada tahun 1992 serta keterlibatan Mantiri dalam peristiwa Dilli 1991. Sedangkan bagi pemerintah Indonesia sendiri apa yang terjadi di Timor Timur merupakan suatu tindakan yang seharusnya untuk dilakukan, Mengingat situasinya pada waktu itu cukup kacau sehingga pemerintah Indonesia mengambil tindakan yang tegas untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

¹⁴ Dikutip dari : [www. Balipost.co.id/balipost](http://www.Balipost.co.id/balipost), *Tentang Indonesia-Australia*, Jakarta, 12 April 2000

Adanya perbedaan kultur tersebut menyebabkan hubungan Indonesia dan Australia menjadi terganggu. Untuk itu perlu dilakukan berbagai pendekatan dalam diplomasi duta besar yang baru. Dimana diperlukan adanya komunikasi dua arah, sehingga antara kedua negara akan saling memahami dan menghindari terjadinya suatu konflik atau gesekan diantara kedua negara. Apabila hal ini dilakukan maka diharapkan hubungan Indonesia dan Australia akan melangkah pada fase yang lebih tinggi dan kokoh terlebih setelah hubungan antar level pemerintah telah dapat terjalin dengan baik selama ini.



3.3 Tinjauan dari segi tata krama diplomatik.

Salah satu tugas seorang diplomat adalah untuk menjalin dan mengembangkan hubungan kerja sama di dalam berbagai bidang. Karena itu seorang wakil (duta besar) haruslah merupakan orang yang disenangi (*persona grata*) oleh pemerintah negara penerima maupun masyarakatnya, dan bukan sebaliknya.

Penilaian terhadap seorang calon duta besar dalam tata krama diplomatik biasanya yang diutamakan adalah mengenai penilaian politik atau sikap politik dari calon duta besar tersebut. Dimana sikap atau pandangan politik tersebut akan berkaitan dengan negara yang akan ditempati baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu masalah kemampuan atau *capability*, kecerdasan, kebijaksanaan seorang duta besar penilaiannya ada pada pemerintah negara pengirim.¹⁵

Hal ini berkaitan dengan penolakan pemerintah Australia terhadap nominasi pencalonan HBL Mantiri sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Indonesia untuk Canberra. Dengan adanya kasus tersebut maka ada beberapa hal yang perlu untuk lebih dicermati. *Pertama*, bahwa pemerintah Indonesia harus menyadari sepenuhnya bahwa menurut sopan santun dalam hubungan internasional, tiap-tiap pemerintah dari suatu negara memang memiliki hak untuk menolak setiap calon duta besar dari negara lain yang akan ditempatkan di negaranya. *Kedua*, bahwa sistem politik yang berlaku di Australia mengharuskan pemerintahannya untuk mengkoordinir pendapat dari oposisi dalam segala permasalahan domestik.

Di dalam tata krama diplomatik, bahwa pencalonan seorang duta besar biasanya melalui berbagai tahap. Tahap pertama adalah tahap lobi. Pada tahap ini pemerintah suatu negara melobi kepada otoritas dari pemerintah yang tertuju tentang kemungkinan untuk menetapkan seseorang sebagai duta besarnya di negara pemerintah yang tertuju. Di

¹⁵ Kompas, *Kasus Batalnya Mantiri Menjadi Duta Besar*, Jakarta, 15 Juli 1995

dalam tahap lobi ini merupakan tahap yang cukup penting sebagai tahap penajakan. Dimana dalam tahap ini akan diperoleh tanggapan yang secara tidak resmi bagaimana kira-kira reaksi pemerintah yang tertuju terhadap usulan tersebut, apakah menerima, menerima dengan catatan atau menolak secara mentah-mentah terhadap calon yang sedang diajukan.

Kernudian pada tahap yang kedua adalah penyampaian berita dimana pada tahap pertama, yaitu lobi tidak dilakukan dengan diplomatik note yang bersifat resmi. Segala komunikasi yang berlangsung di dalam tahap lobi menggunakan saluran-saluran yang tidak resmi, antara lain pemberitahuan secara lisan kepada pejabat senior kedutaan negara yang tertuju, atau pemberitahuan secara informal kepada duta besar dari negara tertuju yang akan segera meninggalkan posnya. Selain itu dapat juga melalui menteri luar negeri yang secara langsung memberitahukan sekali lagi secara informal, mengenai niat daripada pemerintahnya tersebut kepada rekannya dari negara yang tertuju.

Maka karena penyampaiannya bersifat tidak resmi maka jawabannya pun akan bersifat tidak resmi pula. Sampai disini permasalahannya belum akan keluar ke permukaan. Hal ini disebabkan karena di luar kementerian luar negeri kedua negara, belum ada instansi lain yang mungkin mengetahuinya. Dimana segala sesuatu pada era informasi dan era globalisasi ini adakalanya memang sukar untuk dirahasiakan.¹⁶

Berkenaan dengan perihal pencalonan HBL Mantiri sebagai duta besar Indonesia untuk Australia, sebenarnya di kalangan wartawan sebetulnya sudah mendengar isu tersebut kira-kira beberapa bulan yang lalu. Dimana pada saat itu hal tersebut masih merupakan isu, namun karena isu maka orang tidak menanggapinya dengan serius. Kalau usulan mengenai pencalonan seseorang menjadi duta besar di suatu negara yang

¹⁶ Jayakarta, *Soal Mantiri Pakai Kepala Dingin*, Jakarta, 8 Juli 1994, hlm 4

disampaikan secara informal ditolak oleh negara yang dituju, maka berita ini tentunya tidak akan ada kelanjutannya.

Bahkan berita tersebut akan dianggap tidak pernah ada. Sedangkan sebaliknya, apabila usulan tersebut diterima oleh negara yang tertuju, maka negara pertama akan segera untuk memproses lewat jalur yang resmi.

Biasanya di dalam sopan santun hubungan internasional, jarang terdengar bahwa pencalonan seseorang sebagai duta besar ditolak secara mentah-mentah oleh negara yang tertuju. Biasanya yang menjadi berita di media massa adalah bahwa pemerintah negara X telah memberikan persetujuannya terhadap penunjukkan Tuan A sebagai duta besar dari negara Y di negara X.

Hal yang biasa terjadi di dalam tatanan hubungan internasional adalah bahwa negara yang tertuju selalu memberikan persetujuannya terhadap pencalonan seseorang sebagai duta besar dari suatu negara untuk di tempatkan di negara yang tertuju.

Penolakan kepada seorang calon duta besar negara lain secara terbuka memang bisa diinterpretasikan sebagai suatu tindakan insulting (penghinaan) bagi pemerintah yang tertuju. Dimana seorang duta besar merupakan wakil pribadi dari kepala negara atau kepala pemerintahan. Atau dengan kata lain penolakan secara terang-terangan atau terbuka sama artinya dengan menampar muka dari kepala pemerintahan atau kepala negara dari negara si pengirim. Karena itu pada waktu pemerintah negara yang tertuju mengumumkan persetujuannya atas penunjukkan tuan A sebagai duta besar dari negara Y di negaranya, maka proses pencalonan tersebut sudah tentu melampaui dari beberapa tahap. Yang terutama pada tahap lobi, dimana memang sudah diperoleh adanya sinyal diplomatik dari pemerintah negara yang tertuju untuk go a head.

Sudah dikemukakan pada penjelasan diatas, bahwa pemerintah tuan rumah memiliki hak untuk menolak dari pencalonan duta besar dari negara

lain. Banyak pertimbangan yang bisa dikemukakan. Pada tahap informal atau tahap lobi, adanya penolakan seharusnya diterima dengan lapang dada, semata-mata karena pemerintah negara tertuju mempunyai wewenang untuk menerima atau menolak usulan dari calon duta besar tersebut.

Sebagai contoh, pada zaman Presiden Sukarno, pemerintah Indonesia hampir saja menolak pencalonan dari Marshall Green sebagai duta besar AS untuk Indonesia. Hal ini disebabkan karena Green dicurigai sebagai seorang pengacau. Tetapi karena Presiden Sukarno telah terlanjur menyetujui pencalonan tersebut maka ia memerintahkan kepada bangsa Indonesia khususnya melalui kekuatan-kekuatan politik yang anti terhadap imperialisme-kolonialisme untuk menahan diri agar tidak menghambat kedatangan Green.¹⁷

Dengan pencalonan Mantiri tersebut pihak negara penerima Australia merasa keberatan sebab calon yang diajukan oleh pemerintah Indonesia dianggap mempunyai cacat politik. Terutama mengenai keterlibatannya dengan peristiwa Dilli tahun 1991 serta pernyataannya dalam mingguan Editor yang menimbulkan kontroversi.

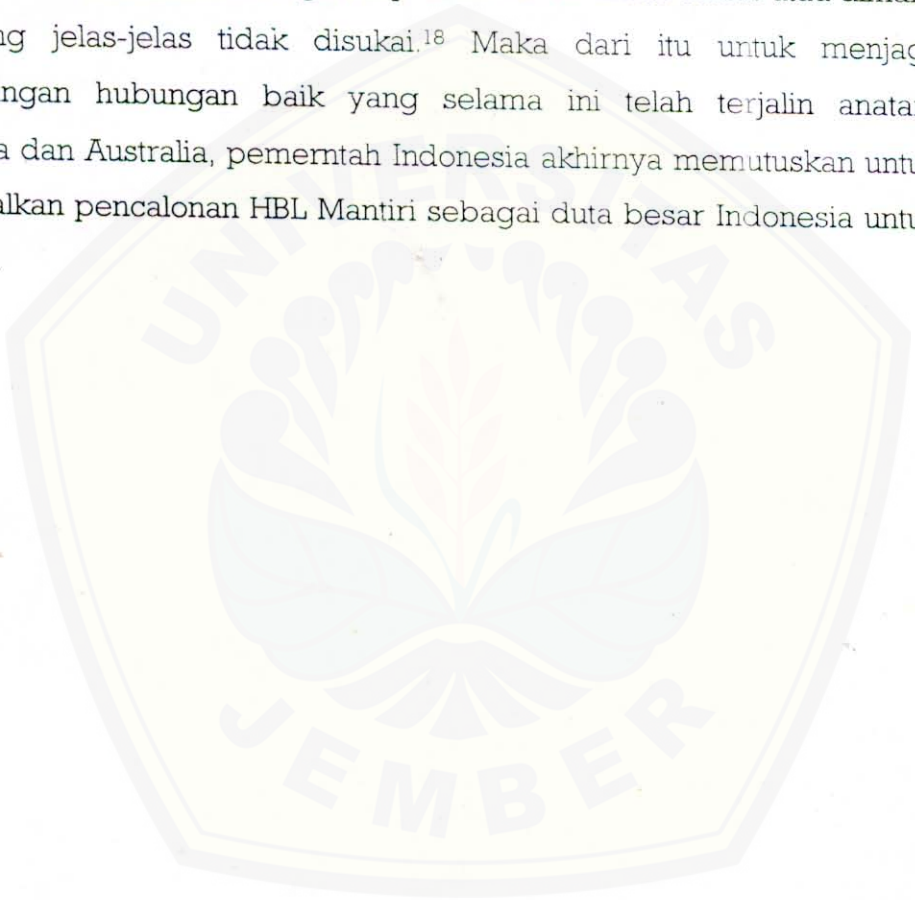
Pemerintah Indonesia tentunya menyadari bahwa penolakan Australia terhadap Mantiri merupakan hak sepenuhnya sebagai negara penerima. Dimana di dalam konteks hubungan internasional setiap negara dapat menolak seorang calon duta besar dari negara lain dengan berbagai alasan yang sepenuhnya merupakan urusan domestik daripada negara yang bersangkutan, sehingga pemerintah negara pertama tidak berhak untuk ikut campur tangan dan menggugatinya.

Karena itu bagaimanapun juga sampai saat ini masalah Timor Timur dan hak asasi manusia masih merupakan permasalahan yang terasa sangat sensitif bagi Australia. Maka dengan belajar dari pengalaman tersebut pada masa mendatang pemerintah Australia menghendaki agar duta besar

¹⁷ Ibid, hlm.5

Indonesia untuk Australia sebaiknya tidak terlibat di dalam sejumlah aksi di Timor Timur yang merupakan hal yang tidak disukai.

Hal ini ditegaskan oleh pernyataan Evans yang menegaskan bahwa point utama yang harus diperhatikan adalah bahwa dia (calon duta besar) harus merupakan seseorang yang tidak memiliki catatan apapun, apakah itu terlibat ataupun mendukung setiap tindakan di Timor Timur atau dimana saja yang jelas-jelas tidak disukai.¹⁸ Maka dari itu untuk menjaga kelangsungan hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara Indonesia dan Australia, pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan untuk membatalkan pencalonan HBL Mantiri sebagai duta besar Indonesia untuk Australia.



¹⁸ Kompas, dalam wawancara dengan Menlu Careth Evans, *"Dubes Indonesia Mendatang Sebaiknya Bebas Timor Timur"*, Sidney, 6 Agustus 1995

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Coplin, William D, *Introduction to International Politics: A theoretical Overview*, Terjemahan Mercedes Marbun, CV Sinar Harapan, Bandung, 1992
- Critchley Susan, *Hubungan Australia dengan Indonesia Faktor Geografi, Politik dan Strategi Keamanan*, UI-Press, Jakarta, 1995
- Frankel Joseph, *Hubungan Internasional*, Terjemahan oleh Drs. Laila H. Hasyim, Bumi Aksara, Anggota IKAPI, Jakarta, 1991
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Research Jilid I*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1988
- Hadi Soesastro dan Tim Mcdonald, *Indonesia-Australia Relation, Diverse Culture, Converging Interest*, CSIS, Jakarta, 1995
- Hamid Zulkifli, *Sistem Politik Australia*, PT Remaja Rosdakarya dengan LIP-FISIP UI, Jakarta, 1999
- Khusyairi Akhmad, *Politik Luar Negeri Australia Dibawah Pemerintahan Gough Withlam (1972-1975) dan hubungannya dengan Indonesia*, Disertasi Doktor di UGM, Yogyakarta, 1995
- Mas'ood Mochtar, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990
- , *Studi HI Tingkat Analisis dan Teorisasi*, PAU UGM, Yogyakarta 1989

Marzuki, *Metodologi Riset*, BPFE UII, Yogyakarta, 1982

Sanit Arbi, *Sistem Politik Indonesia Kestabilan Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1995

The Liang Gie, *Ilmu Politik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1978

Majalah dan Surat Kabar

Gatra, 15 Juli 1995

Tempo, 19/01-06/1996

Tempo, 13 Agustus 2001

Surya, 24 Januari 1996

Pelita, 12 Desember 1978

Merdeka, 16 Oktober 1981

Suara Merdeka, 16 Maret 1996

Suara Merdeka, 12 Desember 1995

Kedaulatan Rakyat, 11 Desember 1995

Jayakarta, 8 Juli 1995

Balipost, 12 April 2001

Kompas 6 Juli 1995

Kompas, 3 Maret 2001

Kompas, 18 Desember 1978

Kompas, 28 Januari 1996

Kompas, 29 Januari 1996

Kompas, April 1996

Kompas, 3 Juli 1995

Kompas, 8 Desember 1995

Kompas, 15 Juli 1995

